

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional maupun Regional perlu disusun suatu Perencanaan strategik, yaitu berupa proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan salah satu Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan pada Visi, Misi Pemerintah Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka menengah Kementerian Perhubungan, Rencana Strategi (Restra) Kementerian Perhubungan Tahun 2021 -2026 dan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Nasional.

Oleh sebab itu, Renstra yang merupakan salah satu dokumen perencanaan dimaksud berisi tentang pemikiran-pemikiran yang strategi dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi yang tentunya tidak terlepas dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang terkait peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;
7. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Jambi 2005 – 2025;
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi;
9. Visi dan Misi Gubernur terpilih
10. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Darat :
 - a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
11. Beberapa aturan tentang angkutan sungai danau dan penyeberangan, antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

- b. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 47 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2009 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi.
 - c. Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2004 Tentang Penyempurnaan KE 15 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1989 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2004.
 - d. Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
 - e. Keputusan Menteri Nomor 5 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Pengganti Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2004.
12. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Laut :
- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
13. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Udara
- a. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional

14. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Kereta Api
 - a. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 1995.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di bidang pembangunan dan penyelenggaraan transportasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Strategis

Sistimatika penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2021 - 2026
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1. Penjelasan Umum

Sistem transportasi yang terintegrasi terpadu dan berkelanjutan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran arus penumpang, barang dan jasa. Sehingga dengan adanya ketersediaan sistem transportasi yang terintegrasi dan terpadu akan menunjang berbagai kegiatan ekonomi untuk [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi, [2] memantapkan stabilitas daerah, [3] meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta [4] mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu sistem transportasi harus dikembangkan secara terpadu inter dan intra moda khususnya dalam rangka menunjang terwujudnya arahan struktur ruang wilayah yang telah direncanakan, mencakup transportasi darat dan perkeretaapian, sungai, danau dan penyeberangan, laut, dan transportasi udara. Pertumbuhan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari tingginya aktivitas maupun peningkatan pembangunan di berbagai sektor, Semua itu membutuhkan dukungan transportasi yang baik. Provinsi Jambi saat ini belum memiliki moda transportasi yang lengkap, moda transportasi yang ada di Provinsi Jambi yaitu transportasi darat, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut serta udara dan akan dikembangkan moda transportasi perkeretaapian.

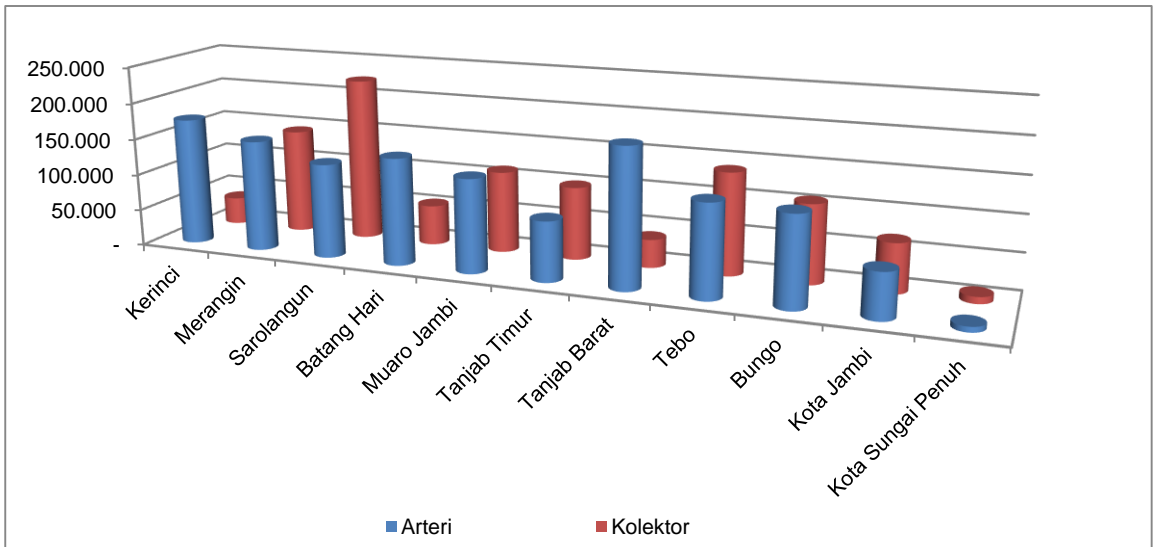
Profil transportasi Provinsi Jambi dapat digambarkan pada penjelasan sebagai berikut.

2.1.1 Transportasi Darat

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Panjang Jalan Nasional 1.317.929 KM atau 56,06% sedangkan Jalan Provinsi 1.032.844 atay 43,94 %.

Tabel Komposisi Jalan Nasional dan Provinsi
Di Provinsi Jambi Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jalan Nasional Arteri	Jalan Provinsi Kolektor	Jumlah
1	Kerinci	174.485	37.322	211.807
2	Merangin	152.085	144.217	296.302
3	Sarolangun	128.957	223.856	352.813
4	Batang Hari	146.225	54.856	201.081
5	Muaro Jambi	128.090	111.794	239.884
6	Tanjab Timur	81.900	99.907	181.807
7	Tanjab Barat	188.384	38.583	226.967
8	Tebo	126.268	138.984	265.252
9	Bungo	122.409	107.179	229.588
10	Kota Jambi	61.943	66.996	128.939
11	Kota Sungai Penuh	7.183	9.150	16.333
Total		1.317.929	1.032.844	2.350.773



- **Terminal**

Terminal sebagai salah satu prasarana transportasi darat di Provinsi Jambi tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota, kecuali di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Dilihat dari tipenya di Provinsi Jambi terdapat 4 (empat) terminal penumpang tipe A, 3 (tiga) terminal penumpang Tipe B dan 12 (tujuh belas) terminal Penumpang tipe C, diketahui bahwa ada 4 terminal tipe-A di Provinsi Jambi, yakni: Terminal Alam Barajo (Kota Jambi), Terminal Bus Sarolangun (Kabupaten Sarolangun), Terminal Bus Bungo (Kabupaten Bungo) dan Terminal Pulau Tujuh (Kabupaten Merangin). Terminal Tipe-A adalah terminal yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, AKAP, AKDP, angkutan kota dan perdesaan.

Adapun terminal tipe-B di Provinsi Jambi yaitu : Terminal Pall X (kota Jambi), Terminal Sijenjang (kota Jambi) dan Terminal Pembengis (Kabupaten Tanjung Jabung Barat) . Terminal Tipe-B adalah terminal dengan fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKDP, angkutan kota dan perdesaan, Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Terminal Tipe A menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pengelolaan Terminal Tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan terminal tipe C menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota..

Terminal tipe B yang telah diserahkan pada menjadi penugasan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk Pengelolaan terminal tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sarana dan Prasana Perhubungan.

KABUPATEN/ KOTA	NAMA TERMINAL	JUMLAH	TAHUN PEMBANGUNAN	KAPASITAS TERMINAL	LUAS (M2) TANAH	LUAS (M2) BANGUNAN	KONDISI
Merangin	Pulau Tujuh (Jl. Lintas KM. 9 Langling Bangko)	1	2005	30 kendaraan	2.978 M2	1.543,25 M2	Baik
Sarolangun	Sri Bulan (Jl. Lintas Sumatera KM. 05 Ds. Bernai Dalam Sarolangun)	1	2008	200 kendaraan	7,4 Ha	4.600 M2	Baik
Kota Jambi	Alam Barajo	1	1994	150 Kendaraan	65.280 M2	2.703 M2	Baik
Bungo	Kota Lintas	1	1996	300 kendaraan	66.000 M2	3.000 M2	Baik
JUMLAH		4					

Daftar Terminal Tipe B di Provinsi Jambi

KABUPATEN/ KOTA	NAMA TERMINAL	JUMLAH	TAHUN PEMBANGUNAN	KAPASITAS TERMINAL	LUAS (M2) TANAH	LUAS (M2) BANGUNAN	KONDISI
Tanjung Jabung Barat	Pembengis	1	1998	100 kendaraan	20.223 M2	60 M2	Rusak berat
Kota Jambi	Pal X	1	*	*	*	*	*
Kota Jambi	Selincih	1	*	*	*	*	*
JUMLAH		3					

Daftar Terminal Tipe C di Provinsi Jambi

KABUPATEN/ KOTA	NAMA TERMINAL	JUMLAH	TAHUN PEMBANGUNAN	KAPASITAS TERMINAL	LUAS (M2) TANAH	LUAS (M2) BANGUNAN	KONDISI
Sarolangun	Angdes Sarolangun (Pasar Sarolangun)	1	1998	40 kendaraan	20.000 M2	150 M2	Baik
	Angdes Singkut (Pasar Singkut)	1	2013	40 kendaraan	15.000 M2	200 M2	Baik
Batang Hari	Muara Bulian	1	1992	50 kendaraan	7.087 M2	586 M2	Baik
Kota Jambi	Rawasari	1	*	*	10.000 M2	*	*
Kerinci	Pasar Semurup	1	*	*	25.000 M2	*	*
Tanjung Jabung Barat	Kota Kuala tungal	1	1995	50 kendaraan	1.454 M2	224 M2	Kurang baik
Tanjung	Blok D	1	*	*	1 Ha	*	Sedang

Jabung Timur	Muara Sabak	1	2003	*	0,25 Ha	*	Rusak berat
Sei. Penuh							
	Tanjung Bajure	1	*	*	10.000 M2	*	*
Bungo	Bungo Baru	1	*	*	*	*	*
Muaro Jambi	Desa Tanjung	1	2005 / 2006	*	3.200 M2	*	Rusak (Tidak aktif)
	Simpang Sungai Duren	1	2005 / 2006	*	1.600 M2	*	Rusak (Tidak aktif)
	Unit IV Sungai Bahar	1	2005 / 2006	*	6.400 M2	*	Rusak (Tidak aktif)
Tebo	Rimbo Bujang	1	1999	*	27.259 M2	*	*
JUMLAH		12					

• **Perlengkapan Jalan**

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan berupa perlengkapan jalan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan memberi petunjuk, peringatan maupun larangan bagi pengguna jalan dalam rangka mewujudkan jalan dan lalu lintas yang berkeselamatan. Lokasi Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan dilaksanakan menurut kewenangan yang diberikan dimana untuk jalan Nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (kementerian Perhubungan)Jalan Provinsi menjadi Tangung jawab Pemerintah Daerah, Jalan Kabupaten/kota menjadi kewenangna Pemerinah Kabupaten/ Kota.

**REKAPITULASI PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI**

No.	Jenis Fasilitas Keselamatan Jalan	Tahun 2016 Lokasi / Jumlah	Tahun 2017 Lokasi / Jumlah	Tahun 2018 Lokasi / Jumlah	Tahun 2019 Lokasi / Jumlah	Tahun 2020 Lokasi / Jumlah
1	Rambu Jalan	- Kab. Tebo (140 unit)	- Kab. Tanjab Timur (140 unit)	- Kab. Tebo (140 unit)	- Kab. Tebo (140 unit)	- Kab. Ma. Jambi (140 unit)
		- Kab. Bungo (280 unit)	- Kab. Ma. Jambi (140 unit)	- Kab. Ma. Jambi (140 unit)	- Kab. Tanjab Barat (140 unit)	- Kab. Tanjab Timur (100 unit)
		- Kab. Batang Hari (140 unit)	- Kab. Tanjab Barat (140 unit)	- Kab. Sarolangun (140 unit)	- Kab. Sarolangun (140 unit)	- Kab. Batanghari (100 unit)
		- Kota Sungai Penuh (140 unit)	- Kab. Tebo (140 unit)	- Kab. Merangin (140 unit)	- Kab. Merangin (140 unit)	- Kab. Tebo (130 unit)
		- Kab. Kerinci (300 unit)	- Kota Sungai Penuh (140 unit)	- Kab. Kerinci (140 unit)	- Kab. Bungo (140 unit)	
2	Marka Jalan	- Kota Jambi (6.000 M)	- Kota Jambi (10.000 M)	- Kota Sungai Penuh (6.000 M)*	- Kota Jambi (20.000 M')	- Kota Jambi (6.000 M')
		- Kab. Ma. Jambi (10.000 M)	- Kab. Ma. Jambi (6.000 M)	- Pengadaan dan Pengecatan marka yellow box (30cm x 3mm) vol. 4500 M (2.843 M) - (ABT)	- Kab. Bungo (10.000 M')	- Kab. Batanghari (4.500 M')
		- Kab. Batang Hari (10.000 M)	- Kab. Tanjab Timur (10.000 M)		- Kab. Tebo (6.000 M')	- Kab. Merangin (5.600 M')
		- Kab. Kerinci (12.000 M)	- Kab. Tanjab Barat (10.000 M)	- Pengadaan dan Pemasangan pita pengaduh tebal 2 cm (0,24 M2) - (ABT)	- Kab. Ma. Jambi (6.000 M')	- Kab. Tebo (5.400 M')
		- Kab. Tanjab Barat (10.000 M)	- Kota Sungai Penuh (12.000 M)		- Kab. Kerinci (6.000 M')	- Kab. Ma. Jambi (6.000 M')
			- Kota Jambi 2 (3.000 M) - (ABT)			- Kab. Kerinci (5.000 M')
						- Kota Sungai Penuh (5.400 M')
						- Kab. Bungo (5.400 M')

3	Delineator	- Kab. Merangin (250 unit)	- Kab. Tanjab Timur (250 unit)	- Kab. Merangin (250 unit)	- Kab. Merangin (250 unit)	- Kab. Batanghari (260 unit)
		- Kab. Sarolangun (250 unit)	- Kab. Merangin (250 unit)	- Kab. Bungo (250 unit)	- Kab. Kerinci (250 unit)	- Kab. Merangin (270 unit)
		- Kab. Tebo (220 unit)	- Kota Sungai Penuh (250 unit)	- Kab. Kerinci (250 unit)		- Kab. Kerinci (258 unit)
		- Kab. Tanjab Timur (220 unit)				
		- Kota Jambi (180 unit)				
4	Paku Jalan	- Kab. Sarolangun (500 unit)	- Kab. Batanghari (500 unit)	- Kab. Tebo (500 unit)	- Kab. Sarolangun (600 unit)	- Kab. Kerinci (382 unit)
		- Kab. Batanghari (500 unit)	- Kab. Bungo (500 unit)	- Kab. Bungo (500 unit)	- Kab. Merangin (600 unit)	
					- Kab. Tebo (600 unit)	
5	RPPJ	- Jalan Provinsi Jambi (15 unit)	- Jalan Provinsi Jambi (15 unit)	- Jalan Provinsi Jambi (15 unit)	- Jalan Provinsi Jambi (12 unit)	- Kab. Sarolangun dan Kab. Merangin (15 unit)
				- Kab. Sarolangun, Kab. Bungo, Kab. Tebo uk. 120 x 240 (12 unit) - (ABT)		
6	Warning Ligth	- Kab. Tanjab Timur (3 unit)	- Kab. Kerinci (3 unit)	- Kab. Kerinci (3 unit)		
		- Kab. Kerinci (3 unit)				
7	Pagar Pengaman Jalan termasuk rambu chevron (440 M')	- Kab. Kerinci (440 M')	- Kota Sungai Penuh (440 M')			
8	Rekayasa Lalu Lintas	- Rekayasa Lalu Lintas (1 paket)	- Rekayasa Lalu Lintas Kota Jambi (Ruang henti khusus)		- Rekayasa Lalu Lintas di Kota Jambi (Ruang henti khusus) (1 paket)	
		- Rekayasa Lalu Lintas (1 total) - (ABT)				

9	Cermin Tikungan	- Kota Sungai Penuh (25 unit)	- Kota Sungai Penuh (30 unit)			
		- Kab. Kerinci (35 unit)				
		- Kab. Tanjab Timur (20 unit)				
		- Kab. Tebo (20 unit)				
10	Lampu Penerangan Jalan Umum	- Kab. Bungo (20 unit)	- Kab. Tebo (20 unit)			
11	Rambu Type F				- Kab. Kerinci (15 unit)	- Kab. Kerinci dan Kab. Merangin (15 unit)
12	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas				- Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (1 paket) - (ABT) / (Pengadaan Movable Barrier) Kota Jambi	
13	Pembangunan Halte BRT				- Pembangunan Halte BRT (20 unit) Kota Jambi dan Kab. Ma. Jambi	- Pembangunan Halte Bus Rapid Transit (BRT) (1 paket / 20 unit) Kota Jambi dan Kab. Ma. Jambi

- Sarana Transportasi Jalan Raya**

Pelayanan transportasi jalan berupa angkutan umum di Provinsi Jambi dilayani oleh Angkutan Kabupaten/Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (AKDP), AJAP, AJDP, Angkutan Sewa, Taksi dan Angkutan Perintis. Angkutan umum sangat penting artinya bagi perjalanan orang, baik untuk perjalanan dalam kota, maupun perjalanan antarkota. Angkutan sewa juga diperlukan untuk mengangkut barang. Kondisi angkutan umum dari tahun ketahun mengalami penurunan baik dari segi kuantitas maupun layanannnya dikarenakan banyaknya angutan Online, angkutan berplat hitam yang beroperasi dan makin tumbuhnya perekonomian jambi menyebabkan makin banyaknya kepemiloikan kendaraan pribadi.

TAHUN	Kendaraan AKAP		Kendaraan AKDP		Kendaraan AJAP		Kendaraan TAKSI	
	Total sesuai PO	yang aktif	Total sesuai PO	yang aktif	Total sesuai PO	yang aktif	Total sesuai PO	yang aktif
2017	83	145	480	502	8	10		
2018	110	148	455	461	4	10		
2019	110	148	455	461	4	10		
%		23,91		74,47		1,62		

- Transportasi sungai**

Sungai-sungai di Provinsi Jambi dengan kedalaman antara 4,5 – 12 meter dan lebar alur minimum 50 meter relatif sangat kecil sehingga hanya dapat dilalui oleh kapal – kapal yang berukuran kecil apabila pada musim kemarau mengakibatkan berkurangnya kedalaman sungai. Sementara itu sungai-sungai yang tidak dapat dilayari adalah Sungai Merangin, Sungai Batang Tabir, Sungai Betara, Sungai Lagan, dan Sungai Pemusiran akibat berbagai kendala antara lain kedalaman kurang dari 3 meter atau lebar sungai/lebar alur sangat sempit. Transportasi sungai dilihat dari sejarahnya merupakan transportasi utama dan menjadi andalan dalam menunjang mobilitas pergerakan orang/barang. Akan tetapi pelan tapi pasti sejalan dengan dibukanya akses jalan menuju ke setiap daerah maka peranan angkutan sungai juga mulai tergeser.

Transportasi sungai dilihat dari sejarahnya merupakan transportasi utama dan menjadi andalan dalam menunjang mobilitas pergerakan orang/barang. Akan tetapi pelan tapi pasti, sejalan dengan dibukanya akses jalan menuju ke setiap daerah maka peranan angkutan sungai juga mulai tergeser. Kondisi saat ini terlihat dari kondisi sekarang ini bahwa angkutan sungai khususnya untuk orang dan barang tertentu tidak saja di Indonesia tetapi bahkan di dunia mulai diambil alih oleh angkutan jalan/rel.

Demikian juga kondisinya yang terjadi di Provinsi Jambi, hal ini terlihat dengan hampir sebagian besar simpul transportasi sungai untuk orang/penumpang di Provinsi Jambi kinerjanya mulai menurun bahkan beberapa sudah ada yang tidak beroperasi lagi (seperti simpul Muara Bulian). Beberapa yang masih beroperasi kebanyakan melayani pergerakan orang untuk penyeberangan (simpul Kota Jambi) atau pergerakan orang antar pulau (Pelabuhan Kuala Tungkal). Tetapi pergerakan orang antar kota dalam Provinsi Jambi hampir semuanya dilayani oleh angkutan jalan. Pembangunan Halte sungai yang menjadi tempat naik dan turunnya penumpang sudah banyak dibangun di kabupaten Muar jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung timur yang memiliki potensi angkutan sungai.

- **Transportasi Penyeberangan**

Pelabuhan Penyeberangan Ro ro Kuala tungkal menjadi satu-satunya Pelabuhan Penyeberangan yang ada di Provinsi Jambi yang menghubungkan ke Kepulauan Riau, dengan rute Kuala Tungkal – Batam dan kuala tungkal – Dabo Sinkep. Dengan dibukanya Pelabuhan Penyeberangan Ro –ro Kuala Tungkal pada khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya akan membuka kawasan Kuala Tungkal sebagai daerah Jasa.

RUTE LINTASAN PELABUHAN RO – RO KUALA TUNGKAL

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PELABUHAN	HIRARKI, PERAN DAN JENIS	LINTASAN
1	Tanjung Jabung Barat	Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal	Hirarki Peran : Pelabuhan Nasional Jenis : Pelabuhan Umum	Kuala Tungkal - Batam Kuala Tungkal – Dabo Singkep

2.1.2. *Transportasi Laut*

Selain simpul-simpul transportasi sungai yang belum diusahakan dan masih dikelola oleh pemerintah cq. Dinas Perhubungan, di Provinsi Jambi ada 3 (tiga) pelabuhan laut yang diusahakan dan dikelola oleh PT. PELINDO, yaitu Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Talang Duku. Pelabuhan Talang Duku utamanya untuk pelabuhan peti kemas dan angkutan barang lainnya (pelabuhan multi purpose), Pelabuhan Muara Sabak melayani angkutan barang, khususnya angkutan hasil perkebunan (kelapa sawit dan ikutannya) dan pertanian.

Pelabuhan Muara Sabak terletak kurang lebih 11 mil dari Ambang Luar Sungai Batanghari dan berada pada lokasi yang lebih menguntungkan dibanding pelabuhan-pelabuhan lainnya. Keberadaan Pelabuhan Muara Sabak diharapkan dapat dikembangkan lebih dari yang ada sekarang sebagai Pelabuhan Pengumpul.

Selain tiga pelabuhan yang diusahakan tersebut, terdapat dua pelabuhan lain yang tidak diusahakan, yakni Pelabuhan Mendahara dan Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keduanya merupakan pelabuhan Pengumpan Regional.

Saat ini Pemerintah Provinsi sedang membangun Pelabuhan Ujung Jabung dimana lokasi Ujung Jabung yang berada di wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi merupakan bagian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terletak di ujung daratan Provinsi Jambi berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan/ALKI 1 dan jalur perdagangan internasional menuju Singapura dan kawasan Asia Barat dan Eropa serta wilayah Indonesia lainnya di Pulau Jawa, Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur.

Kondisi dan Data Pelabuhan di Provinsi Jambi.

Data Pelabuhan Talang Duku

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi	Desa Talang Duku Kabupaten Muara Jambi
2.	Kelas/Hirarki Peran dan Fungsi	Pelabuhan Nasional
3.	Status	Pelabuhan yang diusahakan (PT. Pelindo II)
4.	Master plan	Ada
5.	Tanah Lahan Pelabuhan	50 Ha
6.	Alur Pelayaran	
	a. Panjang	84,50 Mil
	b. Lebar	100 m ²
	c. Kedalaman	Pasang = 9, 00 meter ; Surut = 6,00 meter
7.	Penahan Gelombang	
8.	Dermaga	Konstruksi beton
	a. Ferrocement I (Apung)	
	Panjang	66,80 m
	Lebar	17,05 m
	Kapasitas	3 Ton/m ³
	b. Baja (Apung)	
	Panjang	6,80 m
	Lebar	17,05 m
	Kapasitas	3 Ton/m ³
	c. Ferrocement II (Apung)	
	Panjang	66,80 m
	Lebar	17,05 m
	Kapasitas	3 Ton/m ³
9.	Mooring Buoy	-
10.	Listrik	
	a. PLN	105 KVA
	b. Rumah Genset/Genset	24 m ² / 65 KVA
11.	Talud	312,55 m
12.	Pagar BRC/Kawat Duri	723 m / 750 m
13.	Reservoir Air	1 Unit (Kapasitas 100 Ton)
14.	Rumah Pompa/Pompa Air	1 Unit / 8 m ² (Kapasitas 558 L/detik)
15.	Gudang	1 Unit (2.040 m ² – Konstruksi besi)
16.	Lapangan penumpukan corn blok	12.300 m ²
17.	Perkantoran	900 m ²
18.	Pintu Gerbang	1 Unit (Beton Bertulang)
19.	Jarak dari Ambang Luar	85 Mil

Data Pelabuhan Muara Sabak

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi	Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2.	Kelas/Hirarki Peran dan Fungsi	Pelabuhan Nasional
3.	Status	Pelabuhan yang diusahakan (PT. Pelindo II)
4.	Master plan	Ada
5.	Tanah Lahan Pelabuhan	400 Ha
6.	Luas Pelabuhan	100 Ha
7.	Alur Pelayaran	
	a. Panjang	11,50 Mil ke Ambang Luar
	b. Lebar	100 m ²
	c. Kedalaman	Pasang = 9, 00 meter ; Surut = 6,00 meter
8.	Dermaga	
	a. Lama	Konstruksi kayu
	Panjang	20,50 m
	Lebar	7,50 m
	Kapasitas	0,5 Ton/m ³
	b. Baru	Konstruksi beton
	Panjang	50 m
	Lebar	15 m
	Kapasitas	3 Ton/m ³
9.	Mooring Buoy	Konstruksi beton
10.	Trestle	
	a. Panjang	47 m
11.	Rumah Pompa/Pompa Air	1 Unit
12.	Perkantoran	100 m ²
13.	Pintu Gerbang	-
14.	Rumah Operasional	-
15.	Lapangan Penumpukan	2.300 m ²

Data Pelabuhan Kuala Tungkal

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi	Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2.	Kelas/Hirarki Peran dan Fungsi	Pelabuhan Nasional
3.	Status	Pelabuhan yang diusahakan (PT. Pelindo II)
4.	Master plan	Belum Ada

No	Uraian	Keterangan
5.	Alur Pelayaran	
	a. Panjang	5,50 Mil
	b. Lebar	100 m
	c. Kedalaman	Pasang = 7, 00 meter ; Surut = 4,00 meter
6.	Dermaga	
	a. Lama	Konstruksi beton
	Panjang	20,50 m
	Lebar	7,50 m
	Kapasitas	0,5 Ton/m ³
	b. Baru	Konstruksi beton
	Panjang	75 m
	Lebar	15,50 m
	Kapasitas	1,5 Ton/m ³
7.	Pompa Air	1 Unit
8.	Gudang	600 m ²
9.	Perkantoran	50 m ²
10.	Rumah Telekomunikasi	1 Unit (Type 100)
11.	Telekomunikasi	
	a. SSB	1 unit (Marine Frequency)
	b. VHF	1 unit (Marine Frequency)
12.	Terminal Penumpang	150 m ² (Konstruksi kayu)
13.	Jarak dari Ambang Luar	10 Mil

2.1.3. *Transportasi Udara*

Prasarana utama jaringan perhubungan udara adalah untuk menghubungkan Provinsi Jambi dengan Provinsi lainnya. Jaringan perhubungan udara di Provinsi Jambi harus banyak berperan dalam menghubungkan antar pusat-pusat pengembangan dan antar wilayah di Provinsi Jambi.

Pengembangan sistem prasarana transportasi udara lebih diarahkan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan wilayah Provinsi Jambi serta menekan ketimpangan dengan daerah lainnya dan juga menunjang kegiatan ekspor impor antara Jambi dengan wilayah lainnya.

Pada saat ini terdapat tiga Bandar Udara yaitu Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Depati Parbo, dan Bandara Bungo. Bandar

Udara Sultan Thaha melayani jalur penerbangan Jambi – Jakarta, Jambi - Batam, Jambi - Bandung, Jambi – Bungo, Jambi Palembang, Jambi - Lampung, Jambi – Medan, Jambi – Padang, Jambi - Pekanbaru serta Jambi – Kerinci. Diharapkan Bandara Sultan Taha yang akan datang dapat memiliki jalur penerbangan yang menghubungkan dengan pusat-pusat pertumbuhan di Sumatera khususnya ibukota Provinsi dan berfungsi sebagai Bandara Internasional yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Negara tetangga (singapura dan Malaysia). Bandara Deapati Kerinci akan dikembangkan dalam rangka menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci dan sekitarnya serta diharapkan juga mampu berfungsi sebagai bandara yang dapat mengangkut komoditas barang produksi Kabupaten Kerinci dan sekitarnya (Bandara Cargo). Bandara Bungo yang saat ini melayani rute Bungo – Jakarta merupakan salah satu bandara yang dikembangkan dalam rangka mendukung dan melayani demand penumpang udara dari wilayah Jambi bagian barat termasuk kabupaten terdekat di Provinsi Sumatera Barat.

- **Kinerja Lalu Lintas Jalan Provinsi Di Provinsi Jambi**

Kinerja lalu lintas jalan Provinsi di Provinsi Jambi diukur menggunakan indikator Kecepatan, pebandingan volume dan kapasitas dan kepadatan. Indikator tersebut di hitung dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dilapangan. di Provinsi Jambi rata-rata masih dalam tingkat pelayanan B dikarenakan masih banyak belum terpasangnya fasilitas keselamatan lalu lintas.

Data selengkapnya mengenai kinerja jaringan jalan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Kinerja Lalu lintas Jalan Provinsi Jambi

No	Nama Jalan	Kecepatan (Km/Jam)	Volume (Smp/Jam)	Kepadatan (Smp/Km)	V/C	LOS
1	BANGKO - SEI MANAU	54.94	2264	41.21	0.50	C
2	BATAS BATANG HARI - MUARA BULIAN	56.60	2669	47.16	0.59	C
3	BATAS MA. JAMBI / TANJAB. TIMUR - SP. PELABI / ZONA V	40.00	2264	56.60	0.50	C
4	BTS KERINCI - SANGGARAN AGUNG	48.30	2219	45.94	0.49	C
5	DUSUN TUO - JANGKAT	38.34	1769	46.14	0.39	B
6	JALAN MARTADINATA (SUNGAI PENUH)	48.30	2669	55.26	0.59	C
7	JL. ADE IRMA SURYANI - JL. DR SIWABESI - JL. KH ABDUL MALIK JAMBI	49.96	2264	45.32	0.50	C
8	JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS - JL. YUSUF SINGEDEKANE - JL. H. A. MANAH - JL. ARIEF RAMAN HAKIM	36.68	2669	72.76	0.59	C
9	JL. RANGKAYO HITAM - A KARTAWIRANA - RANGKAYO PINGAI - SENTOT ALB	40.00	2219	55.48	0.49	C
10	JLN. A YANI (SUNGAI PENUH)	48.30	1769	36.63	0.39	B
11	JLN. A YANI (SUNGAI PENUH)	40.00	2669	66.73	0.59	C
12	JLN. ABDUL RAHMAN SALEH	49.96	2264	45.32	0.50	C
13	JLN. ARAH KE RANTAU PANDAN (MUARA BUNGO)	48.30	1589	32.90	0.35	B
14	JLN. COKROAMINOTO (SUNGAI PENUH)	38.34	1544	40.27	0.34	B
15	JLN. DIPONEGORO (SUNGAI PENUH)	49.96	2219	44.42	0.49	C
16	JLN. DR SUTOMO	38.34	1769	46.14	0.39	B
17	JLN. DR. SETIA BUDI - JLN. KH HASYIM ASHARI - JLN. PANGERAN DIPONEGORO	46.64	2264	48.54	0.50	C
18	JLN. GAJAH MADA - JLN. HAYAM WURUK	56.60	2669	47.16	0.59	C
19	JLN. HOS COKRO AMINOTO	40.00	1769	44.23	0.39	B
20	JLN. JENDRAL BASUKI RAHMAT - JLN. H. AGUS SALIM - JLN. H. ADAM MALIK	48.30	1544	31.97	0.34	B
21	JLN. KAPT. MURADI (SUNGAI PENUH)	36.68	2264	61.72	0.50	C
22	JLN. KAPTEN PATIMURA - JLN. KAPTEN BAKARUDIN	48.30	2264	46.87	0.50	C
23	JLN. KOL. ABUNJANI - JLN. SUMANTRI BROJONEGORO	40.00	1589	39.73	0.35	B
24	JLN. M TAHER - GR. DJAMIN DT. BAGINDO - AHMAD BASTARI - BRG KATAMSO	54.94	2219	40.39	0.49	C
25	JLN. M. YAMIN (BANGKO)	48.30	2264	46.87	0.50	C
26	JLN. MAKALAM (BANGKO)	49.96	1769	35.41	0.39	B
27	JLN. RADEN MATTATHER - JLN. M. HUSNI THAMRIN	48.30	159	32.90	0.35	B
28	JLN. RE. MARTADINATA - JLJEND AHMAD YANI - JALAN MT. HARYONO	54.94	1769	32.20	0.39	B
29	JLN. SLAMET RIYADI - JLN. URIP SUMOHARJO	38.34	2264	59.05	0.50	C
30	JLN. SOEKARNO - HATTA (SUNGAI PENUH)	40.00	2264	56.60	0.50	C
31	JLN. SUDIRMAN (MUARA BULAN)	48.30	1769	36.63	0.39	B
32	JLN. SULTAN THAHA (SUNGAI PENUH)	54.94	2264	41.21	0.50	C
33	JUJUN - LEMPUR	48.30	1589	32.90	0.35	B
34	JUJUN - SEI PENUH	49.96	2219	44.42	0.49	C
35	MEKAR JATI (SENYERANG) - BATAS RIAU	49.96	2264	45.32	0.50	C
36	MERLUNG - LUBUK KAMBING	48.30	1589	32.90	0.35	B
37	MUARA BUNGO - JUNCTION/ RANTAU IKIL	49.96	1544	30.90	0.34	B
38	MUARA SIAU - DUSUN TUO	40.00	2219	55.48	0.49	C
39	MUARA TEBO - SP. LOGPON	36.68	2264	61.72	0.50	C

No	Nama Jalan	Kecepatan (Km/Jam)	Volume (Smp/Jam)	Kepadatan (Smp/Km)	V/C	LOS
40	PAUH - LUBUK NAPAL - SIPINTUN - BTS. SUMSEL	54.94	1769	32.20	0.39	B
41	PEKAN GEDANG/ BATANG ASAI - MA TALANG - JANGKAT	36.68	2264	61.72	0.50	C
42	PENINJAU - LBK MENGKUANG - TKA (BTS. SUMBAR)	48.30	2264	46.87	0.50	C
43	RANTAU IKIL - BTS SUMBAR	49.96	2264	45.32	0.50	C
44	SAI SALAK - PEKAN GEDANG/ BATANG ASAI	38.34	1544	40.27	0.34	B
45	SANGGARAN AGUNG - JUJUN	49.96	2264	45.32	0.50	C
46	SANGGARAN AGUNG - SEI. PENUH	36.68	1544	42.09	0.34	B
47	SEI . PENUH - SIULAK DERAS	48.30	1769	36.63	0.39	B
48	SEI MANAU BTS KERINCI	49.96	1589	31.81	0.35	B
49	SEI. SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10/ SENYERANG	54.94	2264	41.21	0.50	C
50	SENGKATI GEDANG - MERLUNG (DUSUN TUO)	38.34	1769	46.14	0.39	B
51	SIMPANG NIAM - LUBUK KAMBING	49.96	2219	44.42	0.49	C
52	SIULAK DERAS - BTS. SUMBAR (LETTER W)	49.96	2264	45.32	0.50	C
53	SP. CANDI/ DESA BARU - BTS. MA. JAMBI/ TANJANG TIMUR	46.64	1769	37.93	0.39	B
54	SP. LAGAN - SP. PELABI / ZONA V	54.94	1544	28.10	0.34	B
55	SP. LOGPON TANJUNG	54.94	2669	48.58	0.59	C
56	SP. PELABI / ZONA V - MUARA SABAK	38.34	2264	59.05	0.50	C
57	SP. PELAWAN - SEI SALAK	40.00	2264	56.60	0.50	C
58	SP. PENEROKAN - SUNGAI BAHAR	40.00	2264	56.60	0.50	C
59	SP. PULAU RENGAS - MUARA SIAU	40.00	2669	66.73	0.59	C
60	SP. SAUMIL - SP. LOGPON	56.60	2219	39.20	0.49	C
61	SP. SIJENJANG - SP. DESA BARU	38.34	2219	57.88	0.49	C
62	SUAK KANDIS - MUARA SABAK	36.68	1589	43.32	0.35	B
63	SUNGAI BAHAR - DURIAN LUNCUK	40.00	2669	66.73	0.59	C
64	SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH	54.94	2669	48.58	0.59	C
65	SUNGAI PENUH - BTS SUMBAR/ TAPAN	54.94	2264	41.21	0.50	C
66	TALANG DUKU / SIMPANG PUDAK - SUAK KANDIS	56.60	2264	40.00	0.50	C
67	TEMPINO - BATAS BATANG HARI	43.32	2264	52.26	0.50	C

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa rata-rata kinerja lalu lintas ruas jalan di Provinsi Jambi masih dalam keadaan yang cukup baik, dimana ruas jalan dimaksud masih dapat mengalirkan arus lalu lintas dengan lancar, namun keberadaan kendaraan lain sudah saling mempengaruhi baik terhadap kecepatan maupun jarak pandang (level pelayanan tertinggi C). Namun di sisi lain, di beberapa ruas jalan dalam kondisi tertentu sudah mengalami berbagai gangguan lalu lintas terkait dengan operasional kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan mengenai Over Dimension dan Over Loading (ODOL), serta operasional kendaraan-kendaraan angkutan batubara. Mengingat bahwa angkutan jalan saat ini menjadi angkutan paling dominan di Provinsi Jambi, sehingga jalan raya mengalami beban yang sangat tinggi

dan berakibat terhadap kerusakan jalan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan umur rencana.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi, memiliki tugas pokok sebagai berikut :

” MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITUGASKAN KEPADA DAERAH”

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan sistem perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.3. Sumber Daya SKPD














Dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi yang dibebankan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi didukung oleh 172 orang sumber daya aparatur serta perlengkapan untuk kelancaran kegiatan rutin dan operasional.

Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terdiri dari :








- 2.3.1. 1 (satu) Orang Pejabat Eselon IIA
- 2.3.2. 4 (empat) Pejabat Eselon IIIA
- 2.3.3 1 (satu) Pejabat Eselon IIIB

2.3.4. 12 (dua belas) Pejabat Eselon IVA,

Dengan komposisi Kepegawaian, adalah sebagai berikut :

	Golongan IV/c	: 1 orang
	Golongan IV/b	: 5 orang
	Golongan IV/a	: 3 orang
	Golongan III/d	: 17 orang
	Golongan III/c	: 10 orang
	Golongan III/b	: 12 orang
	Golongan III/a	: 4 orang
	Golongan II/d	: 4 orang
	Golongan II/c	: 4 orang
	Golongan II/a	: 1 orang
	Golongan I/d	: - orang
	Golongan I/c	: - orang
	Golongan I/b	: - orang

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, maka komposisi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Sebagai berikut :

	Pendidikan S2	: 11 orang
	Pendidikan S1	: 30 orang
	Pendidikan DIV	: - orang
	Pendidikan DIII	: 2 orang
	Pendidikan SLTA	: 18 orang
	Pendidikan SLTP	: 4 orang
	Pendidikan SD	: 2 orang

Selain sumber daya manusia juga perlu didukung oleh Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan sarana mobilitas untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pehubungan Provinsi Jambi.

Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 saat ini berjumlah 18 Unit, Kendaraan Roda 2 sebanyak 14 Unit dan Bangunan Rumah Dinas sebanyak 5 Unit dengan data sebagai berikut :

KENDARAAN DINAS RODA 4 DAN RODA 6

NO.	JENIS, MEREK & TAHUN	NO. POL
1	2	3
1.	Toyota/kijang Inova Rebound 2018	BH. 49
2.	Mitsubhisi/Strada (4x4) 201	BH. 9612 AZ
3.	Toyota Avanza 2	BH. 1828 AZ
4.	Toyota Avanza 2	BH. 1829 AZ
5.	Toyota Avanza 2	BH. 1866 AZ
6.	Toyota Avanza 2	BH. 1867 AZ
7.	Daihatsu Pick Up 2	BH. 9534 AZ
8.	Isuzu Mikro Bus 2	BH. 7039 HZ
9.	Isuzu UCR6Y MU-X R2(4X2) A/T 20	BH. 1023 Z
10.	Isuzu Damp Truck 2	BH. 8167 HZ
11.	Mitsubhisi/Strada (4x4) 20	BH. 8318 Z
12.	Toyota Hilux/Pick Up 20	BH. 9654 AZ
13.	Toyota Hilux/Pick Up 20	BH. 8317 Z
14.	Isuzu Mini Bus 1	BH. 4251 AZ
15.	Toyota Avanza 20	BH. 1706 Z
16.	Isuzu Panther 2	BH. 1548 VQ
17.	Toyota/Kijang Inova 20	BH. 1595 Z
18.	Mitsubishi/Pajero Sport 2020	

KENDARAAN DINAS RODA 2

NO.	JENIS, MEREK & TAHUN	NO. POL
1	2	3
1.	Sepeda Motor Honda PCX 2019	BH. 2123 Z
2.	Sepeda Motor Honda GL 200 1996	BH. 5061 HZ
3.	Sepeda Motor Honda GL Pro 1997	BH. 5221 HZ
4.	Sepeda Motor Honda NF. 25. C 2005	BH. 4410 AZ
5.	Sepeda Motor Honda GL 160 D 2007	BH. 2077 HZ
6.	Sepeda Motor Honda INF 125 JD 2007	BH. 2085 HZ
7.	Sepeda Motor Honda INF 125 JD 2007	BH. 2124 HZ
8.	Sepeda Motor Suzuki Thunder 200	BH. 2497 HZ
9.	Sepeda Motor Suzuki Thunder 201	BH. 2496 HZ
10.	Sepeda Motor Suzuki Thunder 201	BH. 2495 HZ
11.	Sepeda Motor CBR NON ABS 250 2012	BH. 3452 HZ
12.	Sepeda Motor CBR NON ABS 250 2012	BH. 3453 HZ
13.	Sepeda Motor Honda 70 1979	BH. 6828 AZ
14.	Sepeda Motor Honda GL 160 D 2006	BH. 4738 AZ

RUMAH DINAS

NO.	ALAMAT RUMAH	GOL./KELAS	LUAS	
		RUMAH	RUMAH M ²	TANAH M ²
1	2	3	4	5
1.	Jl. Surya Darma KM 10 Jambi	II b	120	
2.	Jl. Empu Sendok Sipin Jambi	II b	200	
3.	Jl. Ma. Bulian Kab. Batanghari	II b	420	
4.	Jl. Kol. Abunjani No. 100A Jambi	II b	89	
5.	Jl. H. Somad Muaro Bungo	II b	300	

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD.

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selaku instansi teknis dilingkungan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugas dekonsentrasi dan desentralisasi di bidang Perhubungan. Oleh sebab itu, maka dirumuskanlah beberapa tujuan dan indikator target terhadap pelaksanaan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan perencanaan dan tersedianya infrastruktur transportasi baik darat, laut dan udara yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi demi terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasional transportasi.

Dengan Indikator Kinerja:

- Jumlah dokumen perencanaan
- Terbangunnya sarana prasarana dan fasilitas keselamatan.
- Capaian pembangunan dan pemeliharaan dalam kondisi baik.
- Jumlah kegiatan pengendalian dan pengaturan yang baik.

Dengan Target Capaian 5 (lima) Tahun:

- Tersusunnya dokumen perencanaan lintas bidang.
- Terpenuhinya sarana prasarana dan fasilitas keselamatan.
- Nilai capaian pembangunan dan pemeliharaan mencapai angka 80 persen.
- Seluruh kegiatan pengendalian dan pengaturan mencapai angka 80 untuk nilai capaian kelancaran.

2. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan menguasai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam rangka mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.

Dengan Indikator Kinerja:

- Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi/kemampuan teknis dibidang perhubungan
- Penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang baik.

Dengan Target Capaian 5 (lima) Tahun:

- 65 % petugas operasional memiliki pengetahuan teknis.
- Pelayanan perhubungan kepada masyarakat memiliki nilai capaian sistem 85 %.

Adapun capaian Rencana Startegi (Renstra) 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2020
1.	Menghasilkan perencanaan dan tersedianya infrastruktur transportasi baik darat, laut maupun udara yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi demi terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasional transportasi.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah usulan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan.• Nilai capaian pembangunan dan pemeliharaan.• Jumlah kegiatan pengendalian dan pengaturan yang baik.	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh usulan pembangunan telah di dasarkan kepada hasil perencanaan yang baik.• Nilai capaian pembangunan dan pemeliharaan mencapai angka 90.• Seluruh kegiatan pengendalian dan pengaturan mencapai angka 85 untuk nilai capaian kelancaran.
2.	Menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia Perhubungan yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi serta mewujudkan iklim usaha transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah SDM Perhubungan yang memiliki Diklat Teknis.	<ul style="list-style-type: none">• 65 % petugas operasional memiliki pengetahuan teknis.

	yang kondusif dan memiliki daya saing.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sistem perizinan yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pelayanan perhubungan mencapai 85 %.
--	--	--	--

Berdasarkan tujuan strategis yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020, maka hasil evaluasi pencapaian seluruh program yang tergambar dalam sasaran strategi Dinas Perhubungan kurun waktu 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Menghasilkan perencanaan dan tersedianya infrastruktur transportasi yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan guna terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasiona transportasi.

Hasil evaluasi pencapaian Target Kinerja Renstra 2016 – 2020 :

SASARAN	PROGRAM	EVALUASI CAPAIAN TARGET
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi. 2. Meningkatnya kualitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi. 3. Terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasional transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Program Pengembangan LLAJ Jambi. Program Pengembangan LLASDP Jambi. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasioan Kendaraan Bermotor. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Pelabuhan Laut Program Pembangunan Bandara 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen perencanaan dan desain pembangunan fasilitas keselamatan transportasi, serta pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, 90 %. Terlaksananya kegiatan pemilihan AKUT dan Penguji Teladan, 80 %. Terlaksananya pengawasan, penertiban terhadap angkutan barang, 80 % . Tersedianya/terbagnunnya fasilitas keselamatan transportasi darat (LLAJ dan SDP), laut dan udara, 80 %. Terpeliharannya sarana dan prasarana transportasi, 70 %.

		<ul style="list-style-type: none"> • Terpasangnya Rambu-rambu DAN Halte Sungai, 70 %.
--	--	--

Tujuan 2 : Menghasilkan kualitas SDM yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi serta mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.

Hasil evaluasi pencapaian target Renstra 2016 – 2020 :

SASARAN	PROGRAM	EVALUASI PENCAPAIAN TARGET
1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia perhubungan yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi. 2. Mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. • Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. • Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Darat, Laut & SDP dan Udara, 100 %. • Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Jalan melalui pengendalian dan penertiban angkutan jalan, 100 %.
		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah melalui pelaksanaan Angkutan Lebaran, Natal dan Haji. • Terlaksananya peningkatan SDM di bidang Perhubungan. • Terlaksananya peningkatan SDM melalui Sosssialisasi kebijakan di bidang Perhubungan serta pendidikan dan pelatihan.

Selain itu juga, Dinas Perhubungan dalam peningkatan pelayanan jasa transportasi juga melaksanakan beberapa tugas pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah :

2.4.1. Pelayanan di bidang transportasi meliputi pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis (advis) seperti :

- Pemberian rekomendasi dan penilaian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Jalan Provinsi,
- Pemberian Advis/Rekomendasi persetujuan Izin Trayek lintas

Provinsi (AKAP).

- Pemberian pertimbangan teknis izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi.
- Pemberian pertimbangan teknis izin penyelenggaraan angkutan angkutan taxi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.
- Pemberian rekomendasi penerbitan izin usah angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi.
- Pemberian rekomendasi penerbitan izin usah angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional.
- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutaun sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
- Pemberian rekomendasi reknis penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.
- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.

- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Dalam rangka menunjang terselenggaranya pelayanan tersebut diatas serta pelayanan-pelayanan administratif lainnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dilaksanakan oleh : 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris dengan 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang dengan 9 (sembilan) Seksi .

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan SKPD

2.5.1. Peluang

- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 beserta aturan turunannya, Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 30, 31, 32 dan 33 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi jambi, merupakan payung pelaksanaan tugas dan wewenang sektor perhubungan di daerah dalam rangka pengembangan/peningkatan sarana/ prasarana perhubungan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- Dukungan dari Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat pengguna jasa perhubungan untuk menjadikan

perhubungan sebagai sektor andalan dalam mendorong, mendukung dan menunjang peningkatan perekonomian daerah.

- Indikasi meningkatnya demand transportasi sebagai dampak dari membaiknya perekonomian daerah.
- Forum Gubernur dan Agenda Sumatera yang merupakan embrio untuk mengembangkan sektor perhubungan di wilayah regional sumatera.
- Kebijakan dan program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang ditunjang dengan Tol Laut menjadikan sektor transportasi sebagai ujung tombak dalam kelancaran dan keberhasilan pembangunan.
- Penetapan kawasan timur Pulau Sumatera sebagai koridor ekonomi dan kawasan Pantai Timur Jambi sebagai Kawasan Strategis Provinsi menjadikan transportasi sebagai sektor strategis baik sebagai pusat distribusi maupun penunjang sektor lain.

2.5.2. Tantangan

- Pemberlakuan perdagangan bebas dan era globalisasi yang merupakan ancaman utama bagi daerah dan sektor perhubungan untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain.
- Potensi sumber daya daerah Jambi yang memerlukan dukungan kelancaran sektor perhubungan dalam rangka menekan biaya transportasi, sehingga dapat memiliki nilai jual dan lebih kompetitif di pasar regional, nasional dan internasional.
- Adanya upaya daerah lain untuk menarik pemasaran komoditas Provinsi Jambi ke daerahnya dengan memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki, merupakan tantangan yang perlu disikapi dengan arif sebagai upaya untuk memacu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana perhubungan yang ada.

Strategi pengembangan infrastruktur perhubungan ke depan, perlu dicermati dan dikembangkan melalui penyusunan strategi yang lebih baik dan berkesinambungan dalam kaitannya dengan letak dan posisi Jambi yang cukup strategis, utamanya dalam menjadikan Jambi sebagai pusat pelayanan.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu-isu Strategis yang berkembang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dimaksudkan adalah untuk merumuskan strategi pembangunan sektor perhubungan yang tepat, terarah dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk melihat Isu Strategis dimaksud dilakukan dengan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

3.1.1. *Urusan Bidang Perhubungan*

a. Permasalahan Transportasi Darat;

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan transportasi darat tidak terlepas dengan jaringan prasarana jalan yang ada. Dimana rata-rata kualitas jalan di Provinsi Jambi dengan kapasitas MST 8 – 10 Ton, sementara angkutan barang yang melintas di jalan umum masih ada yang melebihi kapasitas yang ada. Beberapa identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi darat diantaranya :

- 1) Belum tersedianya jalan khusus untuk angkutan batubara, sehingga sangat mengganggu kinerja pelayanan jalan umum;
- 2) Fasilitas perlengkapan jalan belum bisa memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan;
- 3) Masih belum optimalnya pelayanan beberapa terminal;
- 4) Belum adanya terminal khusus angkutan barang;
- 5) Pelanggaran terhadap ODOL (Over Dimensi Over Loading);

- 6) Belum optimalnya kinerja angkutan umum;
- 7) Beberapa daerah terpencil belum tersentuh angkutan umum;
- 8) Beberapa trayek angkutan umum masih perlu subsidi pemerintah;

b. Permasalahan Transportasi SDP;

Untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan atau disingkat SDP

beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya diantaranya :

1. Minimnya jumlah pegawai yang berkompetensi dalam bidang penyelenggaraan sungai, danau dan penyeberangan;
2. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi adalah perairan, sehingga perlu adanya angkutan sungai yang memadai untuk memfasilitasinya;
3. Belum optimalnya angkutan danau hal ini terkait dengan pengembangan danau sebagai objek pariwisata;
4. Fasilitas pelabuhan penyeberangan Ro-ro Ka. Tungkal masih minim dan perlu pengembangan;
5. Rendahnya pemahaman keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan sungai;

c. Permasalahan Transportasi Pengeretaapian;

1. Terhentinya Proses dan Tahapan Pembangunan Trasn Sumatera;
2. Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera

d. Permasalahan Transportasi Laut;

1. Belum diserahkan Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Provinsi daerah Jambi dan belum adanya penyerahan pengelolaan sumber daya laut di bidang perhubungan yang berada di bawah 12 mil laut (jasa labuh dan sewa pemanfaatan perairan).
2. Kendala alur pelayaran yang sempit dan dangkal serta jauh dari ambang laur menyebabkan keterbatasan kapasitas dan jenis kapal yang dapat berlayardari/ke pelabuhan.

3. Terjadinya High Cost pada transportasi laut dari/ke Provinsi Jambi akibat terjadinya dua kali bongkar muat antar kapal
 4. Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Laut Ujung Jabung;
- e. Permasalahan Transportasi Udara;
1. Belum maksimalnya kucuran dana untuk pengembangan Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Bungo;
 2. Percepatan pengembangan Bandara Depati Parbo Kerinci, Bandara Bungo dan peningkatan status Bandara Sultan Thaha menjadi Bandara Internasional
- f. Permasalahan Transportasi Perkotaan;
1. Kebijakan penataan transportasi perkotaan masih dibatasi dengan pengembangan transportasi masing-masing
 2. wilayah perkotaan di Kabupaten/Kota (belum terintegrasi);
 3. Permasalahan Transportasi Multimoda.
 4. Sarana angkutan umum massal di wilayah aglomerasi dan perkotaan belum berjalan maksimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Gubernur Jambi terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

3.2.1. Visi dan Misi

Visi Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Tahun terpilih telah ditetapkan yaitu ” Terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT.

Visi Gubernur-Wakil Gubernur secara prinsip harus sejalan dengan visi SKPD Dinas Perhubungan yang tentunya dalam pencapaian visi harus didukung dengan infrastruktur yang baik,

karena dengan infrastruktur yang memadai tentunya pola pergerakan perekonomian akan menjadi lancar.

Selain itu didalam pembangunan harus adil artinya fasilitas sarana prasarana dan keselamatan transportasi tentunya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sehingga dengan pemerataan ini transportasi yang menjadi penggerak, pendorong dan penunjang ekonomi akan berfungsi dengan baik di setiap daerah.

Misi Program Gubernur-Wakil Gubernur Jambi 2021-2024 :

1. Penanggulangan Covid-19;
2. Pengembangan kawasan kampung pangan terpadu, sentra produksi ternak dan kelautan;
3. Pengembangan SMK berbasis kompetensi dan keunggulan lokal;
4. Pusdiklat olahraga unggulan menuju industri olahraga;
5. Pengembangan kawasan ekonomi baru SenTuSa (Sengeti-Tungkal-Sabak) melalui pembangunan fasilitas umum kawasan, antara lain: (a) rumah sakit, (b) sekolah kemaritiman, dan (c) perguruan tinggi;
6. Peningkatan life skill santri/santriwati;
7. Percepatan pembangunan pabrik aspal karet;
8. Percepatan hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
9. Percepatan pembangunan kawasan industri dan Pelabuhan Ujung Jabung;
10. Percepatan pengembangan KSPN kerinci seblat dan sekitarnya;
11. Percepatan pengembangan kawasan Geopark Merangin;
12. Percepatan pengembangan KSPN Candi Muaro Jambi dan sekitarnya;
13. Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota;
14. Peningkatan kajian literasi, festival dan lomba budaya daerah;
15. Internet gratis desa dan kota;

16. Digitalisasi pemasaran UMKM, pertanian dan kelautan;
17. Sinergi BUMD dengan UMKM produksi dan pemasaran produk;
18. Sinergi Bumdes dengan UMKM produksi dan pemasaran produk;
19. Penerapan e-Katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa;
20. Peningkatan keterampilan tenaga siap kerja dan berwirausaha;
21. Pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) guna pengendalian aktivitas PETI;
22. Batanghari bersih;
23. Restorasi lahan terancam

Selanjutnya berpijak dari Misi Gubernur-Wakil Gubernur ini, maka Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan sektor transportasi harus mampu mendorong, mendukung dan menunjang sektor lain.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Kab/Kota.

Penyusunan Rencana Strategis OPD diharapkan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sebagai bahan komparasi capaian sasaran dalam Renstra OPD. Sehingga dengan adanya keselarasan akan tercapai sinergi dan satu kesatuan kesisteman transportasi dari mulai Sislognas, Sistranas, Tatranas, Tatrabil dan Tatrakok.

3.4. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Sejalan dengan visi pembangunan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional,

diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

ISU STRATEGIS 1 : Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan Jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

ISU STRATEGIS 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam

melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban.

3.5. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan RI Tahun 2020-2024 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 tahun. Renstra memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedomanan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Kalau kembali kita telaah dengan perencanaan strategi dari Kabupaten/Kota, maka seluruh program kegiatan yang belum ada di daerah telah direncanakan dan dipadukan dengan program rencana strategis Provinsi maupun Nasional. Sementara itu, dalam mensinkronkan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan RI, sesungguhnya Rencana strategis Kementerian tersebut yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 telah menetapkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi sebagai berikut:

1. **Keselamatan dan Keamanan Transportasi**, dengan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi:
 - Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
 - Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
2. **Pelayanan Transportasi**, dengan aspek pelayanan transportasi, yang meliputi:
 - Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
 - Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
 - Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
 - Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
 - Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
 - Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;
3. **Kapasitas Transportasi**, dengan aspek kapasitas transportasi, yang meliputi :

- Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
- Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
- Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 ini, dilakukan dengan metode bottom up dan top down serta mempedomani aturan dan ketentuan yang ada sehingga antar kepentingan pusat, daerah provinsi maupun kabupaten dapat saling bersinergi dan saling mendukung. Pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana transportasi dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih didalam pelaksanaan pembangunan maupun pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas. Sinergitas dan keterpaduan program kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menghindari terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi yang dapat berujung pada penyelenggaraan pelayanan transportasi, Sinkronisasi program kegiatan pembangunan transportasi ini selain itu juga untuk mendukung dan mengakomodir usulan program kegiatan sesuai kebutuhan di daerah dengan ketentuan Kabupaten/Kota telah menyiapkan lahan dan disiapkan dokumen perencanaannya.

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6.1. *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.*

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, merupakan pedoman utama dalam menyusun kebijakan pembangunan baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah.

Dalam RTRW tersebut, mengatur rencana pola ruang yang artinya lebih kepada pemanfaatan ruang wilayah dan rencana struktur

ruang yang merupakan bentuk dan upaya memadukan ataupun merencanakan konektifitas pusat-pusat perkotaan melalui perwujudan sistem yang termasuk didalamnya memperkuat konektifitas tersebut melalui transportasi baik darat, laut dan udara.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi. Telaahan tersebut mulai dari Struktur Ruang yang terdiri dari Sistem Transportasi Jalan, Jaringan Kereta Api, Sistem Transportasi Sungai, Sistem Transportasi Laut dan Sistem Transportasi Laut maupun pola ruang yang telah diatur. Selain itu juga, sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, maka telah diprioritaskan pembangunannya trase untuk wilayah Sumatera khususnya Provinsi Jambi sampai tahun 2033 yang menjadi prioritas utama meliputi Lintas Utama dengan Prioritas sedang pada lintas **Jambi – Betung**, Lintas Utama dengan prioritas rendah pada lintas **Pekanbaru – Jambi**.

Selain itu juga, sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, bahwa sebagian besar merencanakan jaringan rel KA seperti Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Muara Jambi, Kota dan Tanjung Jabung Timur, namun untuk jaringan rel KA yang lokal sedang disusun *master plan* perkeretapihan Provinsi Jambi, yang pembangunan fisiknya nanti dapat diusulkan melalui APBN, maupun APBD baik Kabupaten maupun Provinsi guna menyambung trase utama yang menjadi prioritas Pembangunan Pusat atau Sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Untuk pengembangan transportasi sungai dan laut dalam wilayah Provinsi Jambi, telah dipadukan antara rencana pengembangan di Kabupaten/Kota dengan Provinsi maupun Pusat sehingga dapat sejalan di dalam pengembangan dermaga/pelabuhan baik sungai maupun laut.

Indikasi program dalam mendukung tujuan dan sasaran kebijakan Tata Ruang Provinsi khususnya Bidang Transportasi, antara lain:

1. peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Sultan Thaha;
2. pengembangan Terminal Barang Regional;
3. peningkatan fasilitas terminal regional tipe B;

4. pengembangan pelabuhan laut nasional Ujung Jabung, Kuala Tungkal dan Muara Sabak;
5. pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal tipe C menjadi tipe B;
6. Jalan Akses Bandara yang terdiri dari ruas jalan: Jalan Baru Akses Bandara Sultan Thaha Jambi; Jalan Akses Bandara Bungo; dan Jalan akses Bandara Depati Parbo Kerinci.
7. Jalan Akses Pelabuhan yang terdiri dari ruas jalan akses pelabuhan Ujung Jabung (*Simpang Puduk - Suak Kandis - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Ujung Jabung*) dan ruas akses Pelabuhan Kuala Tungkal (*Simpang Tuan – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Tanjung Jabung Barat; Batas Kabupaten Muaro Jambi – Pematang Lumut; Pematang Lumut – Batas Kota Kuala Tungkal; Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal; Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal; Jalan Sri Sudewi Kuala Tungkal; dan jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal*). Serta ruas jalan akses pelabuhan Muara Sabak (Jalan Batanghari II - Simpang Zona Lima ; dan Simpang Zona Lima - Muara Sabak – Simpang Muara Sabak)
8. Jalan akses Pelabuhan Talang Duku yaitu ruas jalan Batas Kota Jambi - Talang Duku.
9. Pelabuhan sungai yang terdiri dari : Pelabuhan Muara Tembesi di Kabupaten Batang Hari; Pelabuhan Muara Tebo di Kabupaten Tebo; Pelabuhan MuaraBungo di Kabupaten Bungo; Pelabuhan Pauh, Pelabuhan Mandiangin dan pelabuhan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun; Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan Pelabuhan Tungkal Ulu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Pembangunan jaringan angkutan kereta api provinsi melalui pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera; Pembangunan jaringan kereta api provinsi yang menghubungkan Lampung–Palembang–Jambi - Pekanbaru– Medan dan Banda Aceh, serta menghubungkan Wilayah Barat Sumatera;
11. Pembangunan Jaringan jalur kereta api khusus dan Prasarana perkeretapian

12. Optimalisasi pengelolaan kawasan pesisir dan pelabuhan; dan Pengembangan sarana penunjang kegiatan pelabuhan.
13. pengembangan bandar udara umum Sultan Thaha Jambi di Kota Jambi sebagai bandar udara utama;
14. pengembangan bandar udara umum Bungo di Kabupaten Bungo sebagai bandar udara pengumpul; dan
15. pengembangan bandar udara umum Depati Parbo di Kabupaten Kerinci sebagai bandar udara pengumpan.

3.6.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

Pembangunan Sektor Transportasi sebagai satu kesatuan sistem tidak terlepas dari pengaruh secara regional maupun nasional. Demikian juga dengan system transportasi wilayah di Provinsi Jambi, dimana pengaruh issue-isue strategis pengembangan/pembangunan transportasi di tingkat regional dan nasional akan terkait dan memicu dampak terhadap transportasi wilayah Provinsi Jambi. Oleh karena itu di dalam menyusun Rencana Strategis Sektor Transportasi Provinsi Jambi perlu dikaji dan disinergikan dengan program strategis sektor transportasi Pulau Sumatera. Indikasi Program Strategis pembangunan sektor transportasi yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dilaksanakan sesuai dengan system dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Indikasi Program strategis pembangunan sektor transportasi Pulau Sumatera, meliputi :

1. Pembangunan jaringan lintas timur dengan prioritas tinggi yang menghubungkan kota-kota : Bakauheni-Ketapang-Labuhan Maringgai-Sukadana-Menggala-Mesuji-Kayu Agung-Palembang—Pangkalan Balai-Betung-Jambi-Rengat-Pekanbaru-Dumai-Rantau Prapat-Kisaran-Tebing Tinggi-Lubuk Pakam-Medan-Binjai-Langsa-Lhokseumawe-Banda Aceh;
2. Pembangunan jaringan jalan lintas tengah dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota : Bakauheni-Kalianda-Bandar Lampung-Bandar Jaya-Kotabumi-Bukit Kemuning-Blambangan Umpu-Baturaja-Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau-Muara Bungo-Solok-Bukit Tinggi-Kotanopan-Penyabungan-Padang Sidempuan-

Tarutung-Sidikalang-Kutacane-Blang Kejeran-Takengon-Geumpang-Keumala-Jantho-Seulimeun-banda Aceh;

3. Pembangunan jalan lintas barat dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota : Bandar Lampung-Pringsewu-Kota Agung-Krui-Manna-Bengkulu-Painan-Padang-Pariaman-Simpang Empat-Natal-Batumundom-Sibolga-Barus-Subulussalam-Tapaktuan-Meulaboh-Banda Aceh;
4. Pembangunan jaringan jalan pengumpan yang menghubungkan lintas barat, lintas tengah dan/atau lintas timur dengan prioritas tinggi yang menghubungkan kota-kota : Simpang Peut-Jeuram-Beuting Ateuh-Takengon-Biuren-Babahron-Trangon-Blang Kejeran-Pinding-Lokop Peureulak-Jamto-Lamno-Singkil-Sidikalang-Kabanjahe-Medan-Sibolga—Tarutung-Pematang Siantar-Tebing-Tinggi-Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru; Kiliran Jao-Rengat-Kuala Enok; Kiliran Jao-Teluk Kuantan-Pekanbaru; Pekanbaru-bangkinan-Rantau berangin; Simpang Kumuh-Kota tengah-Rangau-Duri; Sei Akar-Bagan Jaya-Enok; Rumba Jaya-Bagan Jaya-Enaok-Kuala Enok; Ujung Batu-Rokan-Batas Sumbar; Muara Bungo—Jambi-Muara Sabak; Sungai Penuh-Sarolangun-Tembesi-Jambi; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu; Tanjung Iman-Muara Sahung-Baturaja-Muara Enim-Palembang-Tanjung Api-API; Muntok-Pangkal Pinang; Tanjung Pandan-Manggar; Krui-Liwa-Bukit Kemuning-Labuhan Maringgai-Simpang Sidomulyo-Tegineneng Metro-Sukadana dan Terbanggi Besar-Menggala.
5. Pembangunan jaringan jalan bebas hambatan pada jalur-jalur padat yang menghubungkan kota-kota.
6. Pembangunan jembatan Sumatera-jawa melalui Selat Sunda.

Indikasi Program Strategis pembangunan system jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Pulau Sumatera diwujudkan secara bertahap menurut prioritas, meliputi :

- a. Pengembangan jaringan transportasi sungai untuk pelayanan angkutan lintas antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang diarahkan pada daerah-daerah potensial di Pulau Sumatera dan membuka daerah terisolir.

- b. Pengembangan angkutan sungai pada lintas-lintas yang sulit dikembangkan dengan jaringan jalan pada sungai-sungai : Musi, **Batanghari** dan Indragiri.
- c. Pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi dan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dengan interaksi kuat di Pulau Sumatera yang meliputi : Sabang-Banda Aceh, Sinabung-Labuhan Haji, Sinabung-Meulaboh, Singkil-Pulau Banyak, Medan-Batam-Medan Lhokseumawe, Gunung Sitoli-Sibolga, Medan-Pangkal Pinang, Pangkal Pinang-Tanjung Pandan, Palembang-Muntok, Tanjung Pandan-Mentawai, **Kuala Tungkal-Tanjung Pinang**, Dumai-Bengkalis-Tanjung Balai Karimun-Batam-Pekanbaru-Batam, Batam-Natuna, Tua Pejat-Padang, Enggano-Bengkulu.

Indikasi Program Strategis pembangunan system jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagiandari system jaringan transportasi laut di Pulau Sumatera diwujudkan secara bertahap menurut prioritas, meliputi :

- a. Kandidat Pelabuhan Hub Internasional di Batam dan Sabang dengan prioritas tinggi
- b. Pelabuhan Internasional di Belawan Medan dan Teluk Bayur Padang dengan prioritas tinggi
- c. Pelabuhan Internasional di Lhokseumawe, Dumai dan Sibolga dengan prioritas sedang
- d. Pelabuhan nasional di Malahayati, Meulaboh, Tanjung Balai, Asahan, Pulau Bai, Tembilahan, Ranai, Kuala Tanjung, Maro Sulit, **Muara Sabak**, Tanjung Api Api, Tanjung Kedabu, Pulau Kijang, Kuala enok, Perawang, Pulau Sambu, Dabo/Singkep, Sungai Pakning, Buatan, Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun dengan prioritas sedang.
- e. Pelabuhan regional di Singkil, Kuala Langsa, Gunung Sitoli, Pangkalan Brandan, Bagan Siapiapi, Pangkalan Dodek, Teluk Dalam, Sinabang, Bintuhan, Kuala Gaung, Kuala Tungkal, Nipah Panjang, Panipahan, Panjalal, Serasan, Sungai Liat, Tanjung Batu, Kota Agung, Sungai Guntung dan Bakauheni dengan skala sedang.

- f. Program pembangunan jaringan prasarana berupa alur dan prasarana keselamatan pelayaran serta jaringan pelayanan yang terdiri atas pelayanan tetap, teratur serta tidak tetap dan tidak teratur.

Indikasi Program Strategis pembangunan system jaringan transportasi udara sebagai bagian dari tatanan kebandarudaraan nasional di Pulau Sumatera menurut prioritas, meliputi :

- a. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer di Kuala Namu Medandan Hang Nadim Batam dengan prioritas tinggi.
- b. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan Ketaping Padang dengan prioritas tinggi.
- c. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier di Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, **Sultan Thaha Jambi**, Fatmawati Bengkulu, Depati Amir Pangkal Pinang, Radin Inten Lampung dan Ranai Natuna dengan skala prioritas sedang.
- d. Bandar udara bukan pusat penyebaran di Cut Nyak Dien Meulaboh, Rembele Takengon, Memun Saleh Sabang, Lasikin Sinabung, Teuku Cut Ali Tapak Tuan, Aek Godang Padang Sidempuan, Sibisa Parapat, Pulau Pulau Batu Nias, **Sungai Penuh Kerinci**, Dabo Singkep, Japura Rengat dan Lubuk Linggau dengan skala sedang.

Terkait dengan program prioritas menurut Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, terdapat beberapa program prioritas pembangunan sektor transportasi di Provinsi Jambi yang sudah masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2020 yaitu Pembangunan Pelabuhan Laut Ujung Jabung yang nantinya akan berfungsi sebagai Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Entry Port serta Pengembangan Bandara Bungo.

3.6.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dimaksudkan untuk mengkaji kebijakan, rencana dan/atau program yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terhadap lingkungan hidup, misalnya dengan melakukan Ahli Fungsi Lahan untuk peruntukan pembangunan jalan rel KA (Trase), Pelabuhan maupun Jembatan Timbang dan Terminal. Kajian rencana dan program ini, diakomodir melalui kebijakan RTRW Provinsi Jambi setelah diinventarisasi kebutuhan Struktur Ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten/Kota untuk peruntukan transportasi baik darat, laut/sungai maupun udara.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan beberapa identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan arah kebijakan pembangunan di sektor perhubungan dalam wilayah Provinsi Jambi diatas, maka beberapa isu-isu strategis yang berkembang antara lain adalah :

- Kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dalam mengantisipasi tingginya arus mobilitas orang/barang/jasa, perlu mendapat perhatian yang serius dan dikembangkan sesuai dengan demand yang terjadi di lapangan.
- Beban lalu lintas jalan yang semakin lama semakin berat dalam menampung arus lalu lintas penumpang maupun barang perlu ditingkatkan kelasnya minimal menjadi jalan kelas II serta perlu dicarikan pengembangan moda alternatif lainnya.
- Pengawasan muatan lebih kendaraan angkutan barang dan Dimensi Kendaraan perlu terus ditingkatkan baik melalui sosialisasi, Uji petik, maupun melalui pengawasan dan pengendalain di Jembatan Timbang dan uji berkala kendaran bermotor.
- Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi perlu terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan dan ketertiban penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
- Pemanfaatan sungai sebagai angkutan barang alternatif dalam rangka mengurangi beban angkutan jalan serta meminimalisir tingkat kerusakan jalan akibat muatan lebih angkutan barang khususnya Batu Bara dan CPO.
- Pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Ujung Jabung yang dapat berfungsi sebagai Outlet dan pusat pendistribusian barang/jasa maupun

orang, perlu diupayakan percepatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh hinterland dan kawasan ekonomi terpadu.

- Pengembangan/pembangunan Bandara Sultan Thaha perlu dilakukan dalam rangka mengakomodir tuntutan dan demand yang terjadi serta menjadikan Bandara Sultan Thaha sebagai bandara bertaraf internasional dan sebagai Bandara Embarkasi Haji.
- Pengembangan dan pengoperasian Bandara Depati Parbo Kerinci perlu diupayakan dalam mendukung perekonomian daerah dan sebagai angkutan alternatif dalam mendukung Kabupaten Kerinci sebagai kawasan wisata dan rest area.
- Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Ro Ro di Kuala Tungkal yang menghubungkan Kuala Tungkal (Provinsi Jambi) dengan Tanjung Uban dan Batam (Provinsi Kepulauan Riau) Frekuensi Pelayanannya harus ditambah dengan menambah jumlah kapal yang beroperasi.
- Pembangunan terminal barang terpadu (dry port) sebagai feeder Pelabuhan Ujung Jabung perlu direncanakan sebagai integrasi moda angkutan.
- Perencanaan dan Pembangunan jalan Kereta Api Sumatra Railway perlu terus diupayakan, sehingga mampu menjadi angkutan alternatif dalam rangka mengurangi beban volume lalu lintas jalan.
- Pengembangan Bandara Bungo sebagai bandara feeder untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.
- Optimalisasi operasional terminal penumpang angkutan jalan
- Peningkatan pelayanan penyelenggaraan transportasi untuk mewujudkan transportasi yang andal, tertib, teratur, lancar, nyaman, aman, selamat, terpadu dan berkelanjutan.
- Peningkatan konektivitas pelayanan angkutan dalam rangka mendukung perkembangan dan pembangunan serta peningkatan perekonomian daerah.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Kewenangan
OPD Dinas Perhubungan
Provinsi Jambi**

NO	KEWENANGAN	ISU STRATEGIS
A	Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan	
1.	Penetapan rencana induk jaringan Provinsi	Jaringan LLAJ belum menyentuh sampai ke pelosok daerah
		Belum terpadunya jaringan LLAJ dan jaringan pelayanan LLAJ inter moda dan antar moda angkutan yang ada.
2.	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Belum adanya update data dan informasi kebutuhan perlengkapan jalan provinsi secara reguler.
		Belum terpenuhinya perlengkaoan jalan sesuai kebutuhan khususnya pada daerah rawan kecelakaan.
		Proporsional penurunan angka kecelakaan terhadap realisasi
3.	Pengelolaan terminal penumpang tipe B	Belum optimalnya kinerja pelayanan di terminal type B
		Belum optimalnya pelayanan terminal sesuai dengan fungsinya
4.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Belum berjalannya evaluasi dan tindaklanjut atas manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan dengan LHR yang tinggi
5.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Andalalin.
6.	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi	Belum berjalannya tim terpadu audit dan inspeksi keselamatan LLAJ lintas stakeholders
7.	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kabupaten/kota.	Belum terpenuhinya kinerja SPM angkutan umum
		Belum optimalnya keterpaduan antar moda angkutan dan operasional angkutan umum massal berbasis bus aglomerasi.

		Belum adanya penanganan yang komprehensif dan terpadu terkait operasional angkutan barang.
		Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, akibat minimnya kenyamanan pelayanan angkutan umum.
8.	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum adanya regulasi penetapan kawasan terintegrasi perkotaan sebagai kota peyangga ibukota provinsi
9.	Penetapan rencana umum jaringan antarkota dalam Daerah provinsi perkotaan yang melampaui batas 1 Daerah Kabupaten / kota	Belum adanya keterpaduan pelayanan transportasi perkotaan/aglomerasi.
10.	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Standart Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan jaringan pelayanan angkutan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

11.	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota / kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum adanya demand dan untuk pelayanan angkutan taksi
13.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
14	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
B	Sub Urusan Pelayanan	
1.	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten /	Sesuai peraturan perundang - undangan
2.	Penertiban izin usaha angkutan laut rakyat bagi orang perorangan atau usaha yang berdomisili dan yang pada lintas pelabuhan antar kabupaten / kota dalam Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah provinsi,	Sesuai peraturan perundang - undangan
3.	Penerbitan izin trayek	Belum ditetapkannya trayek

	angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan	tetap dan teratur pada penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
4.	Penetapan lintas penyeberangan persetujuan pengoperasian kapal antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah provinsi terletak pada jaringan jalan provinsi dan / yangatau jaringan jalur kereta api provinsi.	Sesuai peraturan perundang - undangan
5.	Penetapan lintas penyeberangan persetujuan pengoperasian untuk kapal melayani penyeberangan lintas antar Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu)	Sesuai peraturan perundang - undangan
6.	Penerbitan izin usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa transportasi, angkutan perairan penyewaan peralatan angkutan laut peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas	Sesuai peraturan perundang - undangan
7.	Penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah Provinsi	Sesuai peraturan perundang - undangan
8.	Penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP	Sesuai peraturan perundang - undangan
9.	Pembangunan, penertiban izin dan pengoperasian pelabuhan regional	Sesuai peraturan perundang - undangan
10.	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan Sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Sesuai peraturan perundang - undangan
11	Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	Sesuai peraturan perundang - undangan
12	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional	Sesuai peraturan perundang - undangan
13	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional	Sesuai peraturan perundang - undangan
14	Penerbitan izin Pekerjaan Pengerukan wilayah Perairan Pelabuhan regional	Sesuai peraturan perundang - undangan
15	Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Sesuai peraturan perundang - undangan
16	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan	Sesuai peraturan perundang - undangan
C.	Sub Urusan Perkeretaapian	

1.	Penetapan rencana induk Perkeretaapian Provinsi	Rencana induk jaringan perkeretaapian belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur
2.	Penerbitan izin usaha, isin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota	Sesuai peraturan perundang - undangan
3.	Penetapan jaringan jalur kereta api uang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota dalam 1 (satu)	Penetapan jalur kereta api masih melihat pangsa pasar yang ada
4.	Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi	Sesuai peraturan perundang - undangan
5.	Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian unum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sesuai peraturan perundang – undangan
	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi	Sesuai peraturan perundang - undangan
	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Sesuai peraturan perundang - undangan

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Skpd

4.2.1. Tujuan Jangka Menengah SKPD.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka visi dan misi tersebut perlu diterjemahkan kedalam tujuan strategik organisasi.

Dengan diformulasikannya tujuan strategik, maka Dinas Perhubungan akan dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Lebih daripada itu, dengan diketahuinya tujuan strategik, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan dapat mengukur tingkat keberhasilannya didalam pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam perumusan tujuan stratejik ini tidak terlepas dari program pembangunan daerah tahun 2021 – 2026.

Adapun Tujuan Strategik 5 Tahun ke depan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi;
- Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, andal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia menuju clean government dan good governance.
- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan.
- Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas pelayanan angkutan serta terwujudnya integrasi dan keterpaduan penyelenggaraan transportasi.

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2021). Indikator kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Luasan infrastruktur transportasi terbangun • Jumlah fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang • Luasan/jumlah infrastruktur transportasi yang dipelihara/dirawat/direhab 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh ruang lalu lintas, ruang kegiatan dan titik simpul transportasi terpenuhi fasilitas sarana prasarana keselamatan, 80 %
2.	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi.		
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, handal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas • Prosentase penurunan tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas • Luasan/cakupan wilayah pelayanan jasa angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai capaian penurunan pelanggaran lalu lintas mencapai 70 %. • Nilai capaian prosentase penurunan kecelakaan mencapai angka 75 %. • Penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi mencapai kepuasan 75 %.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas Sumber Daya Manusia menuju clean government dan good governance.	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata tingkat tingkat kepuasan masyarakat. • Prosentase kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan masyarakat mencapai 85 % • 50 % petugas operasional memiliki pengetahuan teknis

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata.

Berdasarkan tujuan strategis Dinas Perhubungan, maka dijabarkan sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Perhubungan tahun 2021–2026 sebagai berikut :

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi dan fasilitas keselamatan transportasi yang didukung oleh system perencanaan yang berkelanjutan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan.
- Meningkatnya pelayanan jasa transportasi melalui pengembangan akses transportasi berbasis transportasi massal baik darat, SDP, Laut dan Udara.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, menguasai teknologi dan memiliki daya saing.

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Kebijakan

5.1.1. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis ini adalah dengan menyusun program-program strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan tersebut adalah :

- Pemenuhan terhadap standar keselamatan transportasi secara bertahap;
- Upaya percepatan pembangunan sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi darat (LLAJ dan SDP), kereta api, laut dan udara yang berkelanjutan.
- Mempertahankan standar tingkat kenyamanan, keselamatan, ketertiban, keandalan transportasi melalui rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
- Melakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian penyelenggaraan transportasi baik melalui uji petik maupun operasi/razia.
- Melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia melalui diklat, kursus dan lain-lain.

5.1.2 Kebijakan

Dengan melihat kondisi dan potensi sektor perhubungan di Provinsi Jambi, kebijakan pembangunan perhubungan di Provinsi Jambi diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan perekonomian di Provinsi Jambi, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan serta diversifikasi industri baik hulu maupun hilir yang berbasis pada potensi andalan daerah. Secara bersamaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan diarahkan untuk menjamin kelancaran mobilitas orang, sumber daya dan distribusi barang/jasa sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi dan mampu bersaing. Kebijakan pembangunan Sektor Perhubungan di Provinsi Jambi diarahkan sebagai berikut :

- ✓ Mempertahankan tingkat jasa pelayanan prasarana dan sarana antara lain melalui rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi;
- ✓ Melanjutkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan program pembangunan serta restrukturisasi dan reformasi di sektor transportasi;
- ✓ Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan transportasi;
- ✓ Pembangunan / peningkatan prasarana dan sarana, fasilitas keselamatan transportasi serta penyiapan dokumen perencanaan transportasi yang mampu menghubungkan seluruh wilayah, pusat produksi dan pusat distribusi melalui darat, SDP, laut dan udara. Selanjutnya dari kebijakan sektor tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan sub sektor sebagai berikut :

5.1.1.1. Sub Sektor Perhubungan Darat.

- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan jalan, fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kesadaran tertib lalu lintas kepada pengemudi kendaraan umum dan pengguna jalan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.
- ✓ Meningkatkan pembinaan dan pengembangan transportasi jalan yang menyeluruh baik di pedesaan, dalam kota, antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi, dalam rangka mewujudkan terciptanya kelancaran arus penumpang dan pendistribusian barang.

- ✓ Pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis bus (BRT) aglomerasi dan peningkatan kinerja angkutan umum, demi terciptanya pelayanan angkutan yang tertib, teratur, andal dan terjangkau.
- ✓ Terciptanya optimalisasi peranan dan pemanfaatan sarana/prasarana transportasi darat (LLAJ dan SDP) dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan sungai dan penyeberangan dalam menembus keterisolasian, melalui peningkatan/pembangunan dermaga/halte sungai, rehabilitasi dermaga sungai dan pemberian subsidi dengan tetap mengutamakan keselamatan dalam wujud pemasangan rambu sungai dan pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran lainnya.
- ✓ Peningkatan dan pembinaan pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan menuju ke arah lebih terjaminnya keselamatan transportasi.
- ✓ Penyediaan sarana dan prasarana angkutan sungai/pedalaman dalam rangka pemberdayaan perekonomian penduduk di daerah sepanjang aliran sungai.
- ✓ Pengembangan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai angkutan alternatif
- ✓ Upaya percepatan program penggunaan prasarana transportasi alternatif guna mengurangi beban angkutan jalan khususnya angkutan barang melalui sungai maupun moda transportasi lainnya.

- ✓ Mendukung upaya percepatan pembangunan Trans Sumatera Railway di Provinsi Jambi dalam rangka mengurangi beban angkutan jalan dan mendukung kelancaran angkutan menuju ke Outlet.
- ✓ Meningkatkan kemampuan SDM, pemantapan kelembagaan serta peningkatan koordinasi antar instansi.
- ✓ Percepatan pembentukan Forum LLAJ dan optimalisasi peran dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang ideal di daerah.

5.1.1.2. Sub Sektor Perhubungan Laut.

- ✓ Fasilitasi dan Percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung untuk melayani arus bongkar/muat dan ekspor/impor, sehingga memenuhi persyaratan sebagai pusat distribusi dan Outlet.
- ✓ Fasilitasi upaya pengembangan dan optimalisasi pemberdayaan pelabuhan Muara Sabak (pengalihan sebagian besar operasional pelabuhan Talang Duku) yang didukung oleh pelabuhan-pelabuhan Kuala Tungkal, Nipah Panjang dan Mendahara, dalam rangkaantisipasi terhadap tuntutan kerjasama regional dan era globalisasi.
- ✓ Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana, prasarana dan operasional pelabuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas (sesuai kewenangan).

- ✓ Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana bantu navigasi sebagai prasarana terpenuhinya standar keselamatan pelayaran.
- ✓ Koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya dukung pelayanan kesyahbandaran.
- ✓ Fasilitasi dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas daya dukung pelayanan keselamatan pelayaran.
- ✓ Fasilitasi Penataan dan relokasi pelabuhan.
- ✓ Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

5.1.1.3. Sub Sektor Perhubungan Udara.

- ✓ Fasilitasi Pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi dalam rangka mendukung pemenuhan syarat sebagai bandara bertaraf internasional.
- ✓ Fasilitasi pengembangan jalur penerbangan nasional dan internasional untuk menunjang kerjasama regional dengan tetap memperhatikan demand angkutan udara.
- ✓ Fasilitasi Peningkatan kualitas jasa bandar udara melalui peningkatan fasilitas penerbangan dan sumber daya manusia.
- ✓ Fasilitasi upaya pengembangan dan pengoperasian kembali Bandar Udara Depati Parbo sebagai bandar udara feeder untuk menunjang program pengembangan kawasan Kerinci sebagai Rest Area Provinsi Jambi.

- ✓ Fasilitasi Operasionalisasi pelayanan transportasi udara dari/ke Bandara Depati Parbo melalui sistim pola kerjasama maupun pemberian subsidi.
- ✓ Fasilitasi Pengembangan Bandara Bungo.

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan sebagai salah satu penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan merupakan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran maupun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

Penjabaran terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD dapat dilihat dalam lampiran tabel dibawah ini :

BAB 7

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam Pelaksanaan Periode Rencana Startegis (Renstra) dapat diukur dari Indikator Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKETOR KINERJA DAERAH
1	Meningkatnya Integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap pelayanan jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas mayarakat terhadap jasa layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasiional, regional dan lokal.	Rasio konektivitas Pelayanan Angkutan	On time Performance Layanan transportasi
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan	Meningkatnya kineja layanan transportasi	Indek kinerja layanan transportasi	Meningkatn ya kinerja Lalu Lintas Angkutan jalan	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Lalu Lintas Akuntabilita s kinerja instansi pemerintah 	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat pelanggaran dan kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatn ya keselamatan trasportasi	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sektor Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio kejadian kecelakaan transportasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor Transportasi

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merujuk pada indikator kinerja Pada Renstra Dinas Perhubungan. Adapun indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yaitu Rasio Konektivitas, Kinerja Lalu Lintas terkait dengan On Time Performance, Indeks Kepuasan kepuasan masyarakat, Kejadian Kecelakaan Transportasi. Secara lengkap indikator kinerja utama, kondisi awal kinerja (Tahun 2021)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rasio Konektivitas Pelayanan Angkutan	%	53.7	53.9	54	54.1	54.2	54.4
2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
3	On Time Performance (OTP)	Nilai	81,4	82,86	85	86	86.30	86.5
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan	Nilai	62.32	83,50	84	84.50	85.30	86.0

BAB 8

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Plt. KEPALA DINAS,

Drs. H. ISMED WIJAYA, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19701025 199003 1 002

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum.....1

1.3. Maksud Dan Tujuan.....4

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.....4

BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD6

2.1. Penjelasan Umum6

2.1.1 *Transportasi Darat*.....7

2.1.2. *Transportasi Laut*..... 16

2.1.3. *Transportasi Udara* 19

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD..... 23

2.3. Sumber Daya SKPD 23

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD..... 26

2.4.1. *Pelayanan di bidang transportasi meliputi pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis (advis) seperti :* 29

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan SKPD..... 31

2.5.1. *Peluang*..... 31

2.5.2. *Tantangan* 32

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 34

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi..... 34

3.1.1. *Urusan Bidang Perhubungan*..... 34

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
36

3.2.1. *Visi dan Misi*..... 36

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Kab/Kota..... 38

3.4. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional..... 38

3.5. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan..... 40

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 42

3.6.1. *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah*..... 42

3.6.2. *Telaahan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera*..... 45

3.6.3. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)* 48

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 49

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Kewenangan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 51

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN 55

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Skpd 55

4.2.1. *Tujuan Jangka Menengah SKPD*..... 55

4.2.2. *Sasaran Jangka Menengah SKPD*..... 57

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Kebijakan 58

5.1.1. *Strategi*..... 58

5.1.2. *Kebijakan*..... 58

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 64

BAB 7 INDIKATOR KINERJA SKPD 65

BAB 8 PENUTUP 67

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDATAAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI																					
KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
1	07	01		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	07	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																	
1	15	01	1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketertiban dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	70%	70%	9.800.000	80%	10.400.000	80%	10.400.000	80%	10.400.000	80%	10.400.000	80%	10.400.000	DISDHUB		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.400.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				400.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000			
1	15	01	1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam bidang perhubungan dan meningkatnya kemampuan kinerja pegawai	70%	70%	800.000	80%	1.200.000	80%	1.200.000	80%	1.200.000	80%	1.200.000	80%	1.200.000	DISDHUB		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				600.000		800.000		800.000		800.000		800.000		800.000			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000			
1	15	01	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran dan kenyamanan tugas aparatur	70%	70%	764.240	80%	1.300.000	80%	1.300.000	80%	1.300.000	80%	1.300.000	80%	1.300.000	DISDHUB		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.918		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				152.265		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				26.983		30.000		50.000		60.000		60.000		60.000			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu				90.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				264.074		620.000		600.000		590.000		590.000		590.000			
1	15	01	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	1.400.000	0	2.200.000	0	2.250.000	0	2.650.000	0	2.650.000	0	800.000		
				Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		0		800.000		800.000		1.200.000		1.200.000				
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		0		0		650.000		650.000		650.000				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000				
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0												
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000				
				- Pengadaan Lahan Untuk Kantong Parkir					600.000		600.000										
1	15	01	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi	70%	70%	453.473	80%	900.000	80%	900.000	80%	900.000	80%	900.000	80%	900.000	DISDHUB		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				18.892		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.685		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				130.896		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000			
1	15	01	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas umum	70%	70%	955.604	80%	1.800.000	80%	2.300.000	80%	2.400.000	80%	2.500.000	80%	2.500.000	DISHUB		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				545.079		650.000		700.000		700.000		700.000		700.000			

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				106.840		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				303.685		950.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000	
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																	
2	15	02	1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0%	20%	200.000	70%	2.410.000	80%	2.331.000	90%	3.155.000	95%	2.800.000	95%	2.360.000	95%	13.256.000	DISHUB
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						1.710.000		1.611.000		2.405.000		2.030.000		1.560.000			
				- Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jambi					1 Lap.	960.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
				- Survai Lalu Lintas Harian Jalan Provinsi					1 Lap.	450.000	1 Lap.	375.000	1 Lap.	375.000	1 Lap.	375.000	1 Lap.	375.000			
				- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat					1 Lap.	100.000	1 Lap.	100.000	1 Lap.	100.000	1 Lap.	100.000	1 Lap.	100.000			
				- Penyusunan Tatrawil					0%	0		0		860.000	0%	0	0%	0			
				- Penyusunan Jaringan trayek dan jaringan lintas					0%	0		476.000	0%	0	0%	0	0%	0			
				- Penyusunan Kajian Daerah Rawan Kecelakaan					0%	0		0	0%	0	1 Lap.	775.000	0%	0	0%		
				- Survai Load Faktor/Kinerja sarana angkutan jalan Provinsi Jambi					0%	0	0%	0	0%	0	1 Lap.	580.000	0%	0			
				- Penyusunan FS Terminal Terpadu					0%	0	1 Lap.	460.000	0%	0	0%	0	0%	0			
				- Survei Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi					1 Lap	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000			
				- Penyusunan DED Terminal Terpadu					0%	0	0%	0	1 Lap.	870.000	0%	0	1 Lap.	885.000			
				- Penyusunan FS lokasi pembangunan Dry port (Terminal Antara Angkutan Barang)					0%	0	0%	0	0%	0	1 Lap.	540.000	0	0			
				- Penyusunan DED Dry port					0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	1 Lap.	780.000			
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		10%		100.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
				- Sosialisasi peraturan dan kebijakan																	
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		10%		100.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
				- Monitoring dan Evaluasi																	
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						400.000	2 Kali	420.000	2 Kali	450.000	2 Kali	470.000	2 Kali	500.000			
2	15	03	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan Jalan, prasarana keselamatan jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan berfungsi fasilitas keselamatan jalan dengan baik.	50%	60%	3.179.468	65%	16.739.041	70%	15.789.055	80%	14.452.759	85%	14.761.059	85%	17.339.375	90%	82.260.758	DISHUB
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya prasarana keselamatan jalan.	3 Paket		397.000		1.117.000		3.762.000		1.762.000		1.762.000		1.762.000			

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026						
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				- Pembangunan kawasan tertib lalu lintas			0%		-		-	0%		-	1 lokasi	450.000	1 lokasi	450.000	1 lokasi	450.000			
				- Pembangunan pedestrian area			0%		-		-	0%		-	1 lokasi	500.000	1 lokasi	500.000	1 lokasi	500.000			
				- Pembuatan Zona Selamat Sekolah			1 lokasi	197.000	2 lokasi	772.000	2 lokasi	772.000	2 lokasi	772.000	2 lokasi	772.000	2 lokasi	772.000	2 lokasi	772.000			
				- Pembuatan lajur sepeda			1 lokasi	200.000	2 lokasi	345.000	2 lokasi	490.000	2 lokasi	490.000	2 lokasi	490.000	2 lokasi	490.000	2 lokasi	490.000			
				- Pembangunan Kantong Parkir							1 Pkt	2.500.000											
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman jalan,	1 Paket		2.527.468		14.857.041		11.262.055		11.925.759		11.939.059		14.517.375	11	Paket	67.028.758		
				- Pemasanga rambu lalu lintas		35%	320 Buah	476.116	484	752.639	645	983.285	645	983.285	645	983.285	807	1.272.657	3.546	Buah	5.451.266		
				- Pembuatan marka jalan, pita penggaduh dan marka karpet		37%	12900 M'	452.299	51717	1.810.082	68955	2.413.442	68955	2.413.442	68955	2.413.442	86194	3.016.803	357.677	M'	12.519.510		
				- Pemasangan pagar pengaman jalan (Guardrail)		0%	0 M'	-	1500	6.705.000									15.000	M'	6.705.000		
				- Pemasangan Rambu Tipe F		25%	32 unit	433.827	121	1.860.833	161	2.481.111	161	2.481.111	161	2.481.111	201	3.101.389	836	Unit	12.839.383		
				- Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)		27%	0 Buah	-	10	131.693	13	175.591	13	188.695	13	188.695	16	235.869	65	Buah	920.543		
				- Pemasangan Delineator		31%	730 Buah	798.154	997	742.691	1329	990.254	1329	990.254	1329	990.254	1662	1.237.818	7.376	Buah	5.749.424		
				- Pemasangan Paku Jalan		19%	1200 Buah	367.072	2640	726.000	3520	968.000	3520	968.000	3520	968.000	4400	1.210.000	18.800	buah	5.207.072		
				- Pemasangan Cermin tikungan		0%	0 Buah	-	17	110.711	23	154.514	23	159.114	23	170.614	29	213.268	115	buah	808.220		
				- Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).		20%	0 Unit	-	30	1.158.000	40	1.544.000	40	1.590.000	40	1.590.000	50	1.987.500	200	unit	7.869.500		
				- Pemasangan warning light		15%	0 Unit	-	5	259.394	6	351.858	6	351.858	6	353.658	8	442.073	30	titik	1.758.840		
				- Pemasangan ATCS / Alat pengendali dan pemantau lalu lintas berbasis online		0%	0 Lokasi	-	1	600.000	2	1.200.000	3	1.800.000	4	1.800.000	5	1.800.000	15	Lokasi	7.200.000		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		5%	5%	135.000	15%	405.000	15%	405.000	20%	405.000	20%	540.000	20%	540.000	5	Unit	2.430.000		
				- Rehab/pemeliharaan fasilitas keselamatan prasarana jalan																			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		5%	5%	120.000	15%	360.000	15%	360.000	20%	360.000	20%	520.000	20%	520.000	11	Paket	2.240.000		
				- Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.																			
2	15	04	1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terpenuhinya SPM Pelayanan dan operasional Terminal Tipe B	30%	40%	1.122.000	1	2.500.000	80%	3.300.000	85%	4.000.000	85%	5.000.000	85%	5.000.000	95%	20.922.000	DISHUB		

[illegible]

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi					-	865.000			898.000		915.000		965.000		365.000		-	
				- Sewa mobilitas darat untuk menunjang operasional embarkasi haji antara																		
				- Penyelenggaraan, Pengendalian dan pengaturan pelaksanaan operasional angkutan lebaran, natal dan tahun baru																		
2	15	09	1.08	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kota Antar Kabupaten	50%	0%		-	55%	97.000	60%	197.000	65%	472.000	70%	751.000	70%	97.000	75%	1.614.000	DISHUB
				Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			0%		-		97.000		197.000		472.000		751.000		97.000			
				- Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BRT			0%		-	1 Lap.	97.000	1 Lap.	97.000	1 Lap.	97.000	1 Lap.	97.000	1 Lap.	97.000			
				- Penyusunan FS dan masterplan pembangunan sarana angkutan umum massal aglomerasi			0%		-	0%	-	0%	-	1 Lap.	375.000	0%	-	0%	-			
				- Penyusunan DED pembangunan sarana angkutan umum massal aglomerasi			0%		-	0%	-	0%	-	0%	-	1 Lap.	654.000	0%	-			
				- Kajian peningkatan standar pelayanan angkutan umum.			0%		-	0%	-	1 Lap.	100.000		-	0%	-	0%	-			
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		0%	0%		-		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		-	
				- Fasilitasi penerapan kebijakan penyusunan angkutan aglomerasi																		
2	15	10	1.09	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten	0%	0%		-	65%	-	70%	250.000	75%	250.000	80%	710.000	80%	250.000	80%	1.460.000	DISHUB
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			0%		-	0	-	0%	-	0%	-	1 Lap.	460.000	0%	-			
				- Penyusunan rencana umum jaringan trayek dan jaringan lintas provinsi																		
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi					-				250.000	1 Paket	250.000	1 Paket	250.000	1 Paket	250.000			
				- Fasilitasi kebijakan penerapan jaringan trayek dan jaringan lintas provinsi																		
2	15	11	1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten	0%	0%		-	0%	-	30%	340.000	35%	600.000	40%	600.000	40%	600.000	45%	2.140.000	DISHUB
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi			0%		-	0%	-	1 Lap.	340.000	0%	-	0%	-	0%	-			
				- Penyusunan kajian Rencana umum jaringan trayek pedesaan dan keperintisan						0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-			

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi					0%	-	0%	-	0%	600.000	0%	600.000	0%	600.000			
				- Fasilitas penerapan kebijakan penetapan jaringan trayek pedesaan dan keperintisan					0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-			
				- Subsidi trayek angkutan keperintisan.				0%	-	0%	-	0%	-	1 Paket	600.000	1 Paket	600.000	1 Paket	600.000		
2	15	12	1.11	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	10%	10%	-	0%		20%	500.000	25%	500.000	30%	500.000	30%	500.000	35%	2.000.000	DISHUB
				Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				-				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
				- Penyusunan studi kebutuhan angkutan umum tidak dalam trayek.																	
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				-				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
				- Fasilitas dan penetapan kebijakan operasional angkutan umum tidak dalam trayek.																	
2	15	13	1.12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10%	10%	400.000	-	20%	400.000	25%	400.000	30%	400.000	30%	400.000	35%	400.000	DISHUB	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem				200.000				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
				- Verifikasi pemenuhan persyaratan perijinan angkutan umum dalam trayek																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				200.000				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
				- Fasilitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan																	
2	15	14	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10%	0%	-	-	20%	400.000	25%	400.000	30%	400.000	30%	400.000	35%	1.600.000	DISHUB	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				-				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
				Verifikasi pemenuhan persyaratan perijinan angkutan umum tidak dalam trayek																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi				-				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				- Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan																	
2	15	15	1.14	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70%	0%	-	75%	500.000	80%	800.000	85%	600.000	85%	675.000	85%	700.000	90%	3.275.000	DISHUB
				Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi				-		-		200.000		-		-		-		200.000	
				- Penyusunan kajian pentarifan angkutan umum di jalan.																	
				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi				-		300.000		350.000		350.000		400.000		400.000		250.000	
				- Penyusunan data dan informasi angkutan																	
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi				-		200.000		250.000		250.000		275.000		300.000		200.000	
				- Monitoring, evaluasi dan pengawasan.																	
2	15	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																	
2	15	03	1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	5%	0%	-	0%	-	20%	300.000	25%	300.000	30%	300.000	30%	300.000	35%	1.200.000	DISHUB
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				-				200.000		200.000		200.000		200.000			
				- Verifikasi pemenuhan persyaratan perijinan angkutan laut.																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				-				100.000		100.000		100.000		100.000			
				- Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perijinan angkutan laut.																	
2	15	03	1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Terpenuhinya zin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan	5%	0%	-	0%	-	20%	150.000	25%	150.000	30%	150.000	30%	150.000	35%	600.000	DISHUB
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan				-		-		100.000		100.000		100.000		100.000			

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				-		-		200.000		200.000		200.000		200.000			
				- Monitoring, pengawasan dan pengendalian operasional angkutan sungai dan penyeberangan.																	
2	15	03	1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terpenuhinya Perilzinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan	0%	0%	-	0%	-	15%	500.000	20%	500.000	25%	500.000	25%	500.000	30%	2.000.000	DISHUB
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				-		-		300.000		300.000		300.000		300.000			
				- Verifikasi dan survai persyaratan perijinan ijin usaha di bidang angkutan laut.																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally				-		-		200.000		200.000		200.000		200.000			
				- Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang angkutan laut.																	
2	15	03	1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas	Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas	0%	0%	-	0%	-	15%	275.000	20%	475.000	25%	275.000	25%	275.000	30%	1.300.000	DISHUB
				Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		200.000		-		-			
				- Penyusunan kajian penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi provinsi.																	
				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				-				200.000		200.000		200.000		200.000			
				- Penyusunan data dan informasi angkutan penyeberangan kelas ekonomi.																	
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				-				75.000		75.000		75.000		75.000			

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				- Monitoring, pengawasan dan pengendalian operasional angkutan penyeberangan provinsi.																	
2	15	03	1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersediannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	30%	0%		50%	1.540.000	70%	2.350.000	85%	2.350.000	85%	2.350.000	85%	1.900.000	90%	10.490.000	DISHUB
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			-			900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000			
				- Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Jambi						640.000											
				- Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan Nipah Panjang.								450.000									
				- Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan Mendahara										450.000							
				- Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan Kuala Tungkal.												450.000					
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			-					200.000		200.000		200.000		200.000			
				- Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan penetapan rencana induk, DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional.																	
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			-					400.000		400.000		400.000		400.000			
				- Monitoring, evaluasi dan pengendalian penetapan rencana induk, DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional.																	
2	15	03	1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya dan Terpeliharanya serta beroperasinya Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	0%	-	20%	-	30%	1.200.000	40%	1.840.000	55%	1.300.000	55%	900.000	60%	5.240.000	DSHUB
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Pembangunan dan Pengumpan Regional			-	1 Lap.			0%	500.000		1.140.000	0%	600.000	0%	200.000			
				- Penyusunan FS Pelabuhan Pengumpan Regional				0%	-	1 Lap.		500.000	0%	-		-	0%	-			
				- Penyusunan DED Pelabuhan Pengumpan Regional				0%	-	0%		-		940.000		-	0%	-			
				- Review Desain Dermaga Pelabuhan Ujung Jabung				1 Lap.		0%		-	0%	-	0%	-	0%	-			
				- Penyusunan AMDAL pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional				0%	-	0%		-	1 Lap.		200.000	1 Lap.	600.000	1 Lap.	200.000		

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2021		2022		2023		2024		2025					2026	
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
					Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional					-			-			-			-			
					- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional																	
					Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional					-			500.000		500.000		500.000		500.000			
					- Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Jambi																	
					Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					-			200.000		200.000		200.000		200.000			
					- Monitoring, evaluasi dan pengendalian operasional pelabuhan pengumpan regional																	
2	15	03	1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0%	0%		-	15%	950.000	20%	4.000.000	25%	2.280.000	30%	6.500.000	30%	8.000.000	40%	21.730.000	DISHUB
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah					-			700.000		1.480.000		700.000		700.000			
					- Verifikasi dan survai pendataan perijinan pembangunan pelabuhan sungai.					-		-	100.000		100.000		100.000		100.000			
					- Penyusunan FS dan masterplan pembangunan pelabuhan sungai					-		-		1 Lap.	780.000							
					- Penyusunan DED pembangunan halte/pelabuhan sungai.					-		600.000	500.000		500.000		500.000		500.000			
					Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					-		150.000	2.500.000			-	5.000.000		6.500.000			
					- Pembangunan halte/dermaga / Pelabuhan Sungai di Provinsi Jambi					-		150.000	2.500.000			-	5.000.000		6.500.000			
					Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah					-		500.000	500.000		500.000		500.000		500.000			
					- Pemeliharaan halte/dermaga / pelabuhan sungai																	
					Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						300.000		300.000		300.000		300.000		300.000			
2	15	03	1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	0%		-	30%	500.000	35%	450.000	40%	450.000	45%	450.000	45%	450.000	50%	2.300.000	DISHUB
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					-		250.000	200.000		200.000		200.000		200.000			

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
				- Penyusunan kajian pengerukan perairan di wilayah pelabuhan pengumpan regional																	
				- Survai, pendataan dan verifikasi persyaratan perijinan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			-				150.000		150.000		150.000		150.000				
				- Fasilitasi, monitoring, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan ijin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional																	
2	15	03	1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	0%	-	0%	-	20%	300.000	25%	300.000	30%	300.000	30%	300.000	35%	1.200.000	DISHUB
				Fasilitasi Pemenuhan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pengumpan Regional dalam Sistem Perizinan			-				150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		
				- Penyusunan kajian penanganan wilayah pantai di perairan pelabuhan pengumpang regional.																	
				- Penyusunan UKL/UPL																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			-				150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		
				- Koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pelaksanaan perijinan penanganan wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.																	
2	15	03	1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	0%	-	0%	-	20%	300.000	25%	300.000	30%	300.000	30%	300.000	35%	1.200.000	DISHUB
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-				150.000		150.000		150.000		150.000				
				- Survai, pendataan dan verifikasi peryaratan perijinan TUKS/TS yang menjadi kewenangan provinsi																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional			-				150.000		150.000		150.000		150.000				
				- Monitoring, pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perijinan TUKS /TS dalam kewenangan provinsi																	
2	15	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN																	
2	15	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi							20%	15.000.000	25%	20.000.000	30%	10.000.000	40%	12.000.000	50%	15.000.000	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							2021		2022		2023		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Penyediaan sarana dan Prasarana Bandar Udara/Lapangan Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia					20%	15.000.000	25%	20.000.000	30%	10.000.000	40%	12.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000)												SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Provinsi					-			200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		
2	15	05	1,04	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Terwujudnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	0%	0%		-	0%		20%	200.000	25%	200.000	25%	200.000	25%	200.000	30%	800.000	DISHUB
				Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi					-	0%		20%	200.000	25%	200.000	25%	200.000	25%	200.000	30%	200.000	
2	15	05	1,05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	0%	0%		-	0%		20%	450.000	25%	450.000	25%	450.000	25%	450.000	30%	1.800.000	DISHUB
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					-			250.000		250.000		250.000		250.000				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi					-			200.000		200.000		200.000		200.000				
2	15	05	1,06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Terpenuhinya Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0%	0%		-	0%		20%	450.000	25%	450.000	25%	450.000	25%	450.000	30%	1.800.000	DISHUB'
				Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi					-			250.000		250.000		250.000		250.000				
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi					-			200.000		200.000		200.000		200.000				
2	15	05	1,07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	0%	0%		-	0%		20%	450.000	25%	450.000	25%	450.000	25%	450.000	30%	1.800.000	DISHUB
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					-			250.000		250.000		250.000		250.000				

